

Laporan Kinerja 2020



**SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**



Kata Pengantar

Laporan Kinerja tahun 2020, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Setmenko Marves) dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana dalam Renstra Setmenko Marves Tahun 2020 - 2024. Kinerja Setmenko Marves Tahun 2020 diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Pernyataan Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Marves.

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sesmenko Marves sepanjang tahun 2020 kami tuangkan dalam Laporan Kinerja, laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Setmenko Marves tahun 2020. Dalam laporan kinerja tahun 2020 disusun hasil capaian sesuai dengan target kinerja yang tercantum dalam PK tahun 2020.

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Setmenko Kemaritiman Tahun 2020-2024. Dalam Laporan Kinerja ini disampaikan hasil dan penjelasan capaian kinerja/kegiatan pada Setmenko Marves yang meliputi Biro Perencanaan, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Komunikasi, serta Inspektorat sampai akhir tahun 2020.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban, kinerja yang telah ditetapkan, dan diharapkan akan semakin memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai perkembangan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan kinerja organisasi Setmenko Marves serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Setmenko Marves dimasa mendatang dan bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2021
Sekretaris Kementerian Koordinator

Agung Kuswandono





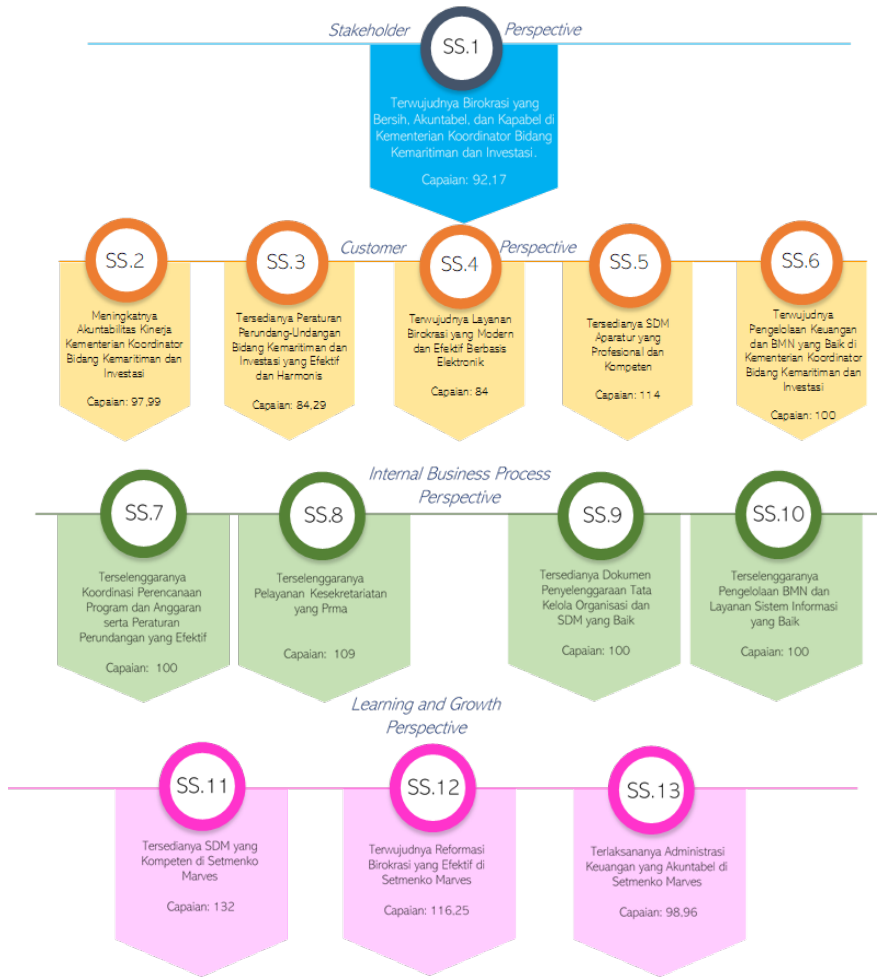
Ringkasan Eksekutif



Kinerja Setmenko Marves diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Setmenko Marves Tahun 2020. Perjanjian Kinerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024. Perencanaan Kinerja disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Setmenko Marves yaitu membantu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Kemenko Marves).

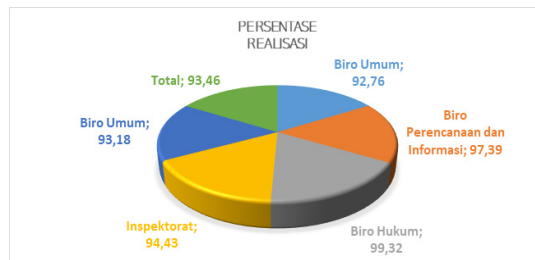
Dalam mencapai tujuannya, Kemenko Marves telah mengadopsi sistem *Balanced Scorecard* sebagai metode/alat bantu dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja. Pencapaian kinerja Setmenko Marves diukur dengan Indikator Kinerja (IK) yang dirinci sesuai target setiap tahunnya. Indikator Kinerja merupakan ukuran kinerja hasil (outcome) yang dihasilkan pada unit kerja Eselon I atau melalui kinerja keluaran (output) dari unit kerja Eselon II dibawahnya yaitu berupa indikator kinerja kegiatan.

Dalam Renstra Setmenko Marves tahun 2020-2024 terdiri dari 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) yang dijabarkan dalam 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja (IK). Capaian kinerja Setmenko Marves tahun 2020 adalah 102,68% dengan rincian sebagai berikut:



Meskipun sempat mengalami stagnasi penyerapan anggaran akibat pandemi Covid-19, realisasi anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator tahun 2020 per 31 Desember 2020 menunjukkan hasil kinerja yang baik. Pada tahun 2020, Sekretariat Kementerian Koordinator memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp 188.271.644.000,- atau sebesar 72 % dari total pagu Kementerian Koordinator. Dari alokasi pagu tersebut, anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp 175.678.682.126 atau sebesar 93,31 %.

No	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	57.914.167.000	50.866.358.648	87,83
2.	Belanja Barang	104.863.189.000	100.602.146.657	95,94
3.	Belanja Modal	25.494.288.000	24.210.176.821	94,96
	Jumlah Belanja	188.271.644.000	175.678.682.126	93,31



Daftar Isi

Kata Pengantar	i	vi	Daftar Tabel
Ringkasan Eksekutif	iii	viii	Daftar Gambar
Daftar Isi	v	ix	Daftar Singkatan & Penjelasan
PENDAHULUAN	1	5	PERENCANAAN KINERJA
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	1	5	Rencana Strategis
Organisasi Kemenko Marves	2	8	Program dan Kegiatan Tahun 2020
Sistematika Penyajian	3	9	Perjanjian Kinerja
AKUNTABILITAS KINERJA			
Capaian Kinerja Tahun 2020	13	42	IKU 13 Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan
IKU 1 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	15	47	IKU 14 Persentase SDM yang Kompeten
IKU 2 Nilai SAKIP Kemenko Marves	20	50	IKU 15 Nilai PMPRB Setmenko
IKU 3 Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan	22	54	IKU 16 Nilai SAKIP Setmenko
IKU 4 Indeks SPBE	24	56	IKU 17 Nilai IKPA Setmenko
IKU 5 Indeks Profesionalitas ASN	27	59	Capaian Realisasi Keuangan
IKU 6 Opini BPK atas Laporan Keuangan	30	61	Capaian Kinerja Strategis
IKU 7 Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai dengan Ketentuan	33	75	Analisa Kondisi Sumber Daya
IKU 8 Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan	34	79	PENUTUP
IKU 9 Persentase Sistem Layanan Kepegawaian yang Baik	36	79	Kesimpulan Langkah Perbaikan Kedepan
IKU 10 Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu	38	81	LAMPIRAN
IKU 11 Persentase Opini Publik yang Positif	39	81	Perjanjian Kinerja
IKU 12 Persentase Pengadaan Barang & Jasa yang Tepat Waktu	41		

Daftar Tabel

Tabel 1. Sasaran Strategis Setmenko Marves 2020	7
Tabel 2. Program dan Kegiatan Tahun 2020	9
Tabel 3. Rincian Target Kinerja Setmenko 2020	9
Tabel 4. Capaian Kinerja TA 2020	13
Tabel 5. Capaian Kinerja SS.1	15
Tabel 6. Hasil Penilaian RB Kemenko Marves Tahun 2019	15
Tabel 7. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 1	16
Tabel 8. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja SS.1	19
Tabel 9. Capaian Kinerja SS.2	19
Tabel 10. Rincian Penilaian SAKIP Kemenko Marves Tahun 2018 dan 2019	20
Tabel 11. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 2	20
Tabel 12. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja SS.2	21
Tabel 13. Capaian Kinerja SS.3	21
Tabel 14. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja SS.3	23
Tabel 15. Capaian Kinerja SS.4	23
Tabel 16. Hasil Penilaian Mandiri SPBE	24
Tabel 17. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 4	25
Tabel 18. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja SS.4	25
Tabel 19. Capaian Kinerja SS.5	26
Tabel 20. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 5	26
Tabel 21. Bobot dan Capaian IP ASN Kemenko Marves Tahun 2020	27
Tabel 22. Perbandingan Capaian dan Target SS.5	29
Tabel 23. Capaian Kinerja SS.6	29
Tabel 24. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 6	30
Tabel 25. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja SS.7	31
Tabel 26. Capaian Kinerja SS.7	31
Tabel 27. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 7	32
Tabel 28. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 7	33
Tabel 29. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 8	34
Tabel 30. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 8	35
Tabel 31. Capaian Kinerja SS.8	35
Tabel 32. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 9	36
Tabel 33. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 9	36
Tabel 34. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 10	37
Tabel 35. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 10	37
Tabel 36. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 11	38
Tabel 37. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 11	39
Tabel 38. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 12	40
Tabel 39. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 12	40
Tabel 40. Capaian Kinerja SS.9	40
Tabel 41. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 13	41
Tabel 42. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja SS.9	42
Tabel 43. Capaian Kinerja SS.10	42
Tabel 44. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 14	42
Tabel 45. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 14	43
Tabel 46. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 15	43
Tabel 47. Rincian Aplikasi Umum di Lingkungan Kemenko Marves	44
Tabel 48. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 15	45
Tabel 49. Capaian Kinerja SS.11	45
Tabel 50. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 16	46
Tabel 51. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja SS.11	48
Tabel 52. Capaian Kinerja SS. 12	48
Tabel 53. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 17	48

Tabel 54. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 17	52
Tabel 55. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 17	52
Tabel 56. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 18	53
Tabel 57. Capaian Kinerja SS.13	53
Tabel 58. Rincian Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2019 dan 2020	54
Tabel 59. Rincian Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2020	54
Tabel 60. Rincian Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2019 dan 2020	55
Tabel 61. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja SS.13	55
Tabel 62. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 19	55
Tabel 63. Pagu dan Realisasi Anggara Setmenko Per 31 Desember 2020	57
Tabel 64. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Setmenko Tahun 2020	57



Sumber : Kota Jakarta (Unsplash.com)

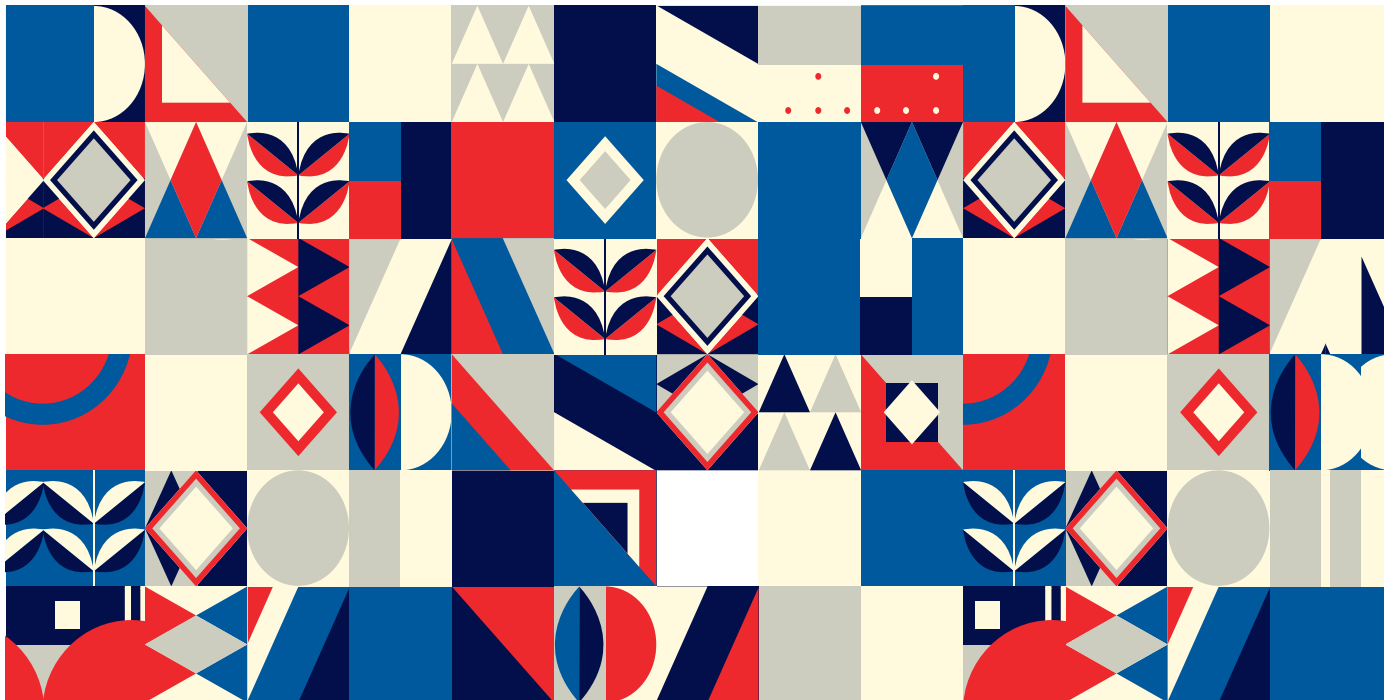
Daftar Gambar dan Grafik

Daftar Gambar

Gambar 1. Fungsi Setmenko Marves	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator.....	2
Gambar 3. Peta Strategis Setmenko Marves	6
Gambar 4. Pagu Anggaran Setmenko Marves TA. 2020.....	8
Gambar 5. Komposisi bobot IKU Terhadap Tingkat Kendali dan Tingkat Validitas	11
Gambar 6. Bobot Penilaian Bukti Hasil Kerja.....	11
Gambar 7. Nilai Indeks SPBE.....	24
Gambar 8. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi Pusat Kementerian	27
Gambar 9. Rancangan Rpermenko yang telah disahkan menjadi Permenko dan di upload JIH Kemenko Marves.....	34

Daftar Grafik

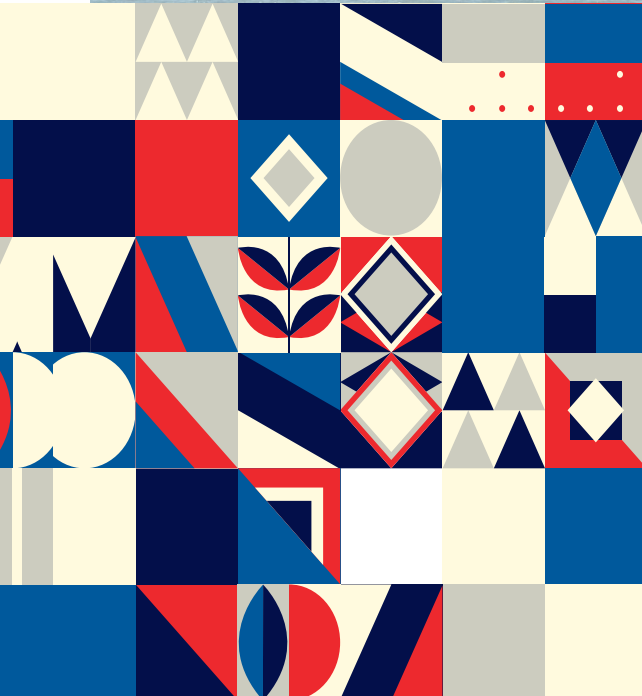
Grafik 1. Data Pegawai Kemenko Marves Mengikuti Diklat.....	28
Grafik 2. Data Pegawai Kemenko Marves Mengikuti Diklat.....	28
Grafik 3. Sentimen Opini Publik.....	39
Grafik 4. Capaian Nilai IKPA Kemenko Marves.....	54
Grafik 5. Realisasi Unit Kerja Lingkup Setmenko.....	57
Grafik 6. Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator Periode Tahun 2015 s.d. 2020	58
Grafik 7. Jumlah Pegawai Lingkup Setmenko Tahun 2020.....	72
Grafik 8. Pegawai Lingkup Setmenko Berdasarkan Usia.....	73
Grafik 9. Pegawai Lingkup Setmenko Berdasarkan Jenjang Pendidikan	73
Grafik 10. Data Pegawai Kemenko Marves Mengikuti Diklat	74
Grafik 11. Data Pegawai Kemenko Marves Mengikuti Diklat	74



Daftar Singkatan dan Penjelasan



APIP	: Aparat Pengawas Internal Pemerintah
BSC	: Balanced Score Card
KP	: Indikator Kinerja Program
IK	: Indikator Kinerja
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKU	: Indikator Kinerja Utama
Kemenko Marves	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Menko	: Menteri Koordinator
PK	: Perjanjian Kinerja
RB	: Reformasi Birokrasi
Roren	: Biro Perencanaan
Rosi	: Biro Komunikasi
Roum	: Biro Umum
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja
Setmenko Marves	: Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Sesmenko Marves	: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SP	: Sasaran Program
SS	: Sasaran Strategis
TA	: Tahun Anggaran







BAB I. Pendahuluan

Setmenko Marves mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator (Kemenko) Marves. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Rencana Strategis Setmenko Marves Tahun 2020-2024.

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK), Setmenko Marves pada tahun 2020 telah melakukan beberapa kegiatan, berbagai kegiatan tersebut diadakan dengan maksud agar dapat membantu dan mengawal tugas dan fungsi Setmenko Marves dapat tercapai secara akuntabel. Laporan Kinerja merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja yang di dalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran.

Sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pencapaian kinerja pada tahun 2020, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2020. Laporan Kinerja Setmenko Marves Tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020 dan awal pelaksanaan dari Renstra Setmenko Marves tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Setmenko Marves dalam mendukung pembangunan bidang kemaritiman dan investasi. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi Setmenko Marves sekaligus menjadi bahan masukan dari berbagai stakeholder bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang sebagai perbaikan kinerja. Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014.

Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Setmenko Marves dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi dibidang perencanaan program dan anggaran, dukungan peraturan perundang-undangan, tata kelola organisasi, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, ketatausahaan dan protokol, hubungan masyarakat, serta pengelolaan data dan sistem informasi.

1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

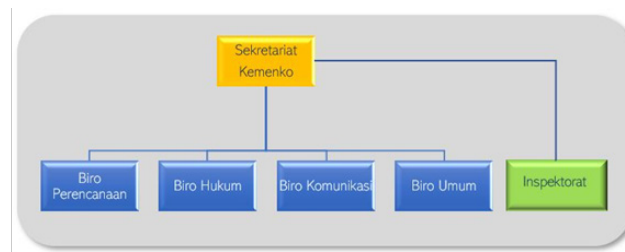
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kementerian Koordinator adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko Marves yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenko Marves. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Setmenko menyelenggarakan fungsi:



Gambar 1. Fungsi Setmenko Marves

1.2. Organisasi Kemenko Marves

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Setmenko Marves terdiri dari: Biro Perencanaan; Biro Hukum; Biro Komunikasi; dan Biro Umum. Selain membawahi 4 (empat) biro tersebut di atas, Sesmenko, atas nama Menteri Koordinator, juga mengoordinasikan unit kerja Inspektorat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kemenko Marves. Struktur organisasi Sekretariat Kemenko Marves seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator

Tugas dan fungsi Unit Kerja Lingkup Kemenko Marves, sebagai berikut:



Dalam struktur organisasi Kemenko Marves, sesuai dengan Permenko Nomor 2 Tahun 2020, Inspektorat di bawah perintah langsung Menteri Koordinator. Namun dalam operasional dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Kementerian Koordinator. Sehingga dalam penyajian Laporan Kinerja Setmenko ini memasukan capaian kinerja yang dihasilkan/menjadi tanggung jawab Inspektorat.

1.3. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Setmenko Marves sampai akhir tahun 2020. Kemudian membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap capaian kinerja tersebut, sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut di atas, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Setmenko Marves pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi Setmenko, dan Sistematisa Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Program dan Kegiatan, serta Perjanjian Kinerja Setmenko Tahun 2020 dan Pengukuran Kinerja Organisasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sedangkan pada bab ini menjelaskan tentang:

1. Realisasi kinerja Setmenko Marves
Pada subbab ini diuraikan realisasi kinerja Setmenko Marves berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung Renstra.
2. Realisasi Anggaran
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.
3. Realisasi Kinerja lainnya
Pada subbab ini disajikan capaian kinerja lainnya yang meliputi (1) Prestasi yang diraih selama 2020; (2) Program dukungan/Inovasi dalam rangka mendukung pencapaian RB Kemenko Marves.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Setmenko Marves selama Tahun 2020 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN

Berisi perjanjian kinerja, kegiatan Setmenko Tahun 2020.





BAB II. Rencana Kerja

2.1 Rencana Strategis

Guna mendukung visi Kemenko Marves yaitu Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong. Berdasarkan Renstra Setmenko Marves tahun 2020-2024 visi, misi, dan tujuan setmenko sebagai berikut:



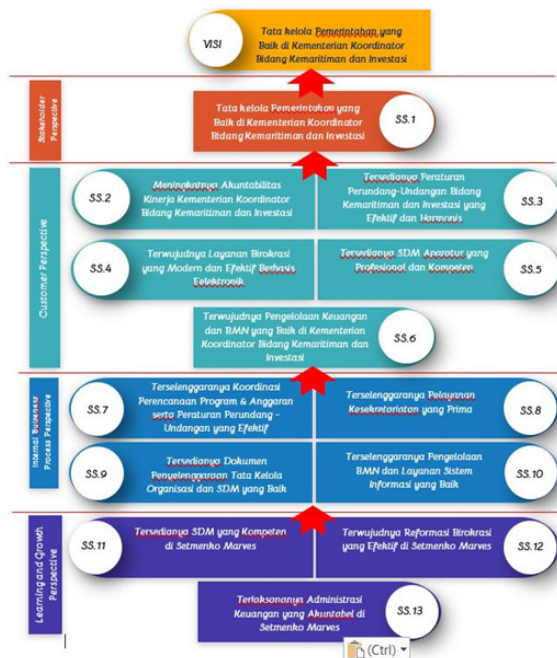
Rumusan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Fungsi Setmenko sesuai Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves;
2. Sekretariat Koordinator merupakan unit kerja pendukung bagi unit kerja Eselon I lainnya di lingkup Kemenko Marves agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal;
3. Budaya kerja organisasi di Kemenko Marves yaitu *Passion, Accountable, Teamwork, Efficient/Effective dan Networking* (PATEN).

Perencanaan Strategis pada prinsipnya merencanakan kondisi akhir (visi, tujuan dan sasaran) dan cara menyapai kondisi akhir (misi, strategi dan program) serta indikator keberhasilannya. Untuk menjelaskan hubungan antara kondisi akhir dan cara menyapai kondisi akhir dengan indikator keberhasilannya tersebut menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC) digambarkan dalam bentuk peta strategis sebagai berikut:

Peta strategis Setmenko Marves membagi sasaran kementerian ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan (stakeholder perspective) menggambarkan pencapaian tujuan, perspektif pengguna (customer perspective) menggambarkan pencapaian sasaran strategis, perspektif proses bisnis internal (internal business process perspective) pencapaian kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran; dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective) menggambarkan pencapaian penguatan sumberdaya dan aspek penunjang tugas lainnya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong proses bisnis dan layanan Sekretariat Kemenko Marves yang lebih baik. Seluruh unit kerja Setmenko Marves telah berkomitmen kuat dalam perbaikan capaian atas perjanjian kinerja dengan terus melakukan perbaikan setiap tahun dan menyusun indikator yang menantang serta tidak langsung puas terhadap kinerja yang telah dicapai. Untuk terus mempertahankan kinerja dimasa mendatang, maka langkah yang dilakukan yaitu laporan kinerja Setmenko Marves tahun 2019 dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan strategis Setmenko Marves tahun 2020-2024, tahun



Gambar 1. Peta Strategis Setmenko Marves

2020 adalah tahun pertama dari pelaksanaan 5 tahun perencanaan strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kemenko Marves 2020-2024, dimana tahun 2020 menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan atas target yang telah dituangkan dalam dokumen tersebut.

Tabel 1. Sasaran Strategis Setmenko Marves 2020

<i>Perspective</i>		Indikator Kinerja	Unit Kerja Penanggungjawab
<i>Stakeholders</i>			
SS.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	Seluruh Unit Kera
<i>Customer</i>			
SS.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Nilai SAKIP Kemenko Marves	Biro Perencanaan
SS.3	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan	Biro Hukum
SS.4	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Eelektronik	Indeks SPBE	Biro Komunikasi
SS.5	Tersedianya SDM Aparatur Yang Profesional dan Kompeten	Indeks Profesionalitas ASN	Biro Umum
SS.6	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Biro Umum & Inspektorat
<i>Internal Business Process</i>			
SS.7	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Program & Anggaran serta Peraturan Perundang - Undangan yang Efektif	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai dengan Ketentuan	Biro Perencanaan
		Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan	Biro Hukum
SS.8	Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan yang Prima	Persentase Sistem Layanan Kepegawaian yang Baik	Biro Umum
		Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu	Biro Umum
		Persentase Opini Publik yang Positif	Biro Komunikasi
		Persentase Pengadaan Barang & Jasa yang Tepat Waktu	Biro Umum
SS.9	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik	Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan	Biro Hukum & Biro Umum
SS.10	Terselenggaranya Pengelolaan BMN dan Layanan Sistem Informasi yang Baik	Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara	Biro Umum
		Pemenuhan Kebutuhan Minimal Aplikasi Umum yang Terintegrasi Lingkup Kemenko Marves	Biro Komunikasi
<i>Learning & Growth</i>			
SS.11	Tersedianya SDM yang Kompeten di Setmenko Marves	Persentase SDM yang Kompeten	Biro Umum
SS.12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Setmenko Marves	Nilai PMPRB Setmenko	Biro Hukum
		Nilai SAKIP Setmenko	Biro Perencanaan
SS.13	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Setmenko Marves	Nilai IKPA Setmenko	Biro Umum

2.2 Program dan Kegiatan Tahun 2020

Setmenko Marves pada tahun 2020 memiliki program yaitu: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan 5 kegiatan. Berdasarkan Laporan Kinerja Kemenko Marves Tahun 2019, program dan kegiatan tahun 2020 merupakan lanjutan atas program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 karena adanya perubahan SOTK baru di Kemenko Marves sehingga adanya penambahan jumlah kegiatan, hal ini dalam upaya peningkatan kinerja atas pencapaian indikator yang belum maksimal di tahun 2019.

Penyusunan anggaran Tahun 2020, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan performance based budgeting dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Berdasarkan hasil pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. DJA, Setmenko Marves mendapat pagu anggaran pada awal tahun 2020 sebesar Rp. 192.275.119.000,- dari pagu keseluruhan Kemenko Marves sebesar Rp. 259.596.417.000,- (72%). Kemudian setelah dilakukan revisi karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 selama tahun 2020 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 188.271.644.000,- atau pengurangan anggaran sebesar Rp. 4.003.475.000,-. Jumlah anggaran keseluruhan tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 kegiatan yang terangkum sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	188.271.644.000,-
Total Pagu Anggaran	188.271.644.000,-



Gambar 1. Pagu Anggaran Setmenko Marves TA. 2020

Tabel 2. Program dan Kegiatan Tahun 2020

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu	Unit Kerja
120.01.01 Program Dukungan Manegemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman				
1	5601	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	159.352.927.000	Biro Umum
2	5602	Penyusunan Rencana Program Anggaran Kerja Sama Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	17.954.467.000	Biro Perencanaan dan Informasi
3	5603	Pengelolaan Informasi Persidangan Kehumasan Administrasi Hukum dan Organisasi	6.430.796.000	Biro Hukum
4	5604	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman	3.290.000.000	Inspektorat
5	5748	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional	1.243.454.000	Biro Umum
TOTAL			188.271.644.000	

2.3 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja Setmenko Marves ditetapkan target kinerja tahun 2020. Target kinerja ini terdiri dari sasaran program serta indikator kinerja tahun 2020. Tidak semua sasaran program ditargetkan untuk direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020. Adapun rincian target kinerja (sasaran program) Setmenko Marves TA. 2020 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
<i>Stakeholders Perspective</i>				
SS.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	75
<i>Customer Perspective</i>				
SS.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2	Nilai SAKIP Kemenko Marves	70
SS.3	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis	3	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan	3.5
SS.4	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Eelektronik	4	Indeks SPBE	3
SS.5	Tersedianya SDM Aparatur Yang Profesional dan Kompeten	5	Indeks Profesionalitas ASN	71
SS.6	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	6	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
<i>Internal Business Process Perspective</i>				
SS.7	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Program & Anggaran serta Peraturan Perundang - Undangan yang Efektif	7	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai dengan Ketentuan	100
		8	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan	100

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
SS.8	Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan yang Prima	9	Persentase Sistem Layanan Kepegawaian yang Baik	80
		10	Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu	95
		11	Persentase Opini Publik yang Positif	70
		12	Persentase Pengadaan Barang & Jasa yang Tepat Waktu	100
SS.9	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik	13	Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan	>=5
SS.10	Terselenggaranya Pengelolaan BMN dan Layanan Sistem Informasi yang Baik	14	Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara	100
		15	Pemenuhan Kebutuhan Minimal Aplikasi Umum yang Terintegrasi Lingkup Kemenko Marves	4
<i>Learning & Growth Perspective</i>				
SS.11	Tersedianya SDM yang Kompeten di Setmenko Marves	16	Persentase SDM yang Kompeten	75
SS.12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Setmenko Marves	17	Nilai PMPRB Setmenko	70
		18	Nilai SAKIP Setmenko	75
SS.13	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Setmenko Marves	19	Nilai IKPA Setmenko	95

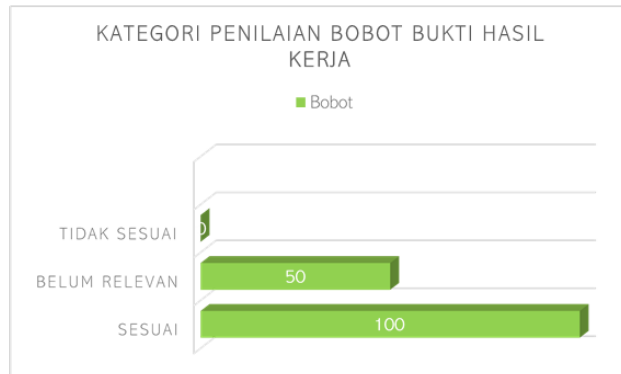
Penghitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi yang capaiannya lebih 120% dari target, akan disampaikan/dilaporkan 120%. Hal ini ditetapkan dengan alasan agar unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan target kinerja dengan lebih cermat dan sesuai dengan kelayakan berdasarkan kemampuan personil dan anggaran yang ada. Perhitungan capaian dari realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung capaian IKU:
 - a. Penghitungan capaian IKU dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - Tingkat kendali dan tingkat validitas suatu IKU, dengan komposisi bobot sebagai berikut:



Gambar 1. Komposisi bobot IKU Terhadap Tingkat Kendali dan Tingkat Validitas

- Bukti hasil kinerja, dengan komposisi bobot sebagai berikut:



Gambar 1 . Bobot Penilaian Bukti Hasil Kerja

- Menghitung persentase capaian Indikator Kinerja Utama, yaitu dengan membagi capaian berbanding targetnya

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Menghitung persentase capaian final IKU , yaitu dengan mengalikan Capaian IKU dengan Data Dukung (*evidence*)

$$\text{Capaian Final IKU} = \text{Capaian IKU} \times \text{Data Dukung}$$

- Menghitung capaian Sasaran Strategis

Penghitungan didapatkan dengan perkalian antara capaian final IKU dan bobot final kemudian dibagikan terhadap total bobot final IKU per SS yang ada targetnya

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Capaian Final IKU} \times \text{Bobot Final IKU}}{\text{Total bobot final IKU yang ada targetnya per SS}} \times 100\%$$

- Perspektif didapat dari hasil perkalian capaian sasaran dan bobot sasaran kemudian dibagi terhadap total bobot sasaran per perspektif

$$\text{Perspektif} = \frac{\text{Capaian Sasaran} \times \text{Bobot sasaran}}{\text{Total bobot sasaran per Perspective}} \times 100\%$$

- Capaian Kerja Unit dihasilkan dari perkalian capaian perspektif dengan bobot perspektif yang dibagi terhadap total bobot perspektif

$$\text{Capaian kerja Unit} = \frac{\text{Capaian Perspective} \times \text{Bobot Perspective}}{\text{Total Bobot perspective}} \times 100\%$$





BAB III. Akuntabilitas Kerja

Akuntabilitas Kinerja Setmenko Marves merupakan kinerja yang merupakan kontribusi seluruh unit kerja lingkup Setmenko Marves melalui pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Akuntabilitas ini tergambarkan dari capaian kinerja yang tertuang dalam setiap indikator yang menggambarkan ketercapaian sasaran strategis yang menunjukkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan Setmenko Marves.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Target kinerja Setmenko Marves pada tahun anggaran 2020 yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Setmenko Marves Tahun 2020, terdiri dari 13 (empat belas) sasaran strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Target kinerja kinerja tersebut disusun dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal business perspective*, serta *learning and growth perspective*. Realisasi Capaian kinerja Setmenko Marves tahun 2020 yaitu 102,68%. Secara keseluruhan, capaian kinerja Setmenko Marves Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja TA 2020

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UMUM	TARGET	REALISASI	TARGET AKHIR 2024	% CAPAIAN	
<i>Stakeholders Perspective</i>						92,17	
SS.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	75	69,13*)	90	92,17
<i>Customer Perspective</i>						96,35	
SS.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2	Nilai SAKIP Kemenko Marves	70	68,59	85	97,99
SS.3	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis	3	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan	3,5	2,95	4,5	84,29
SS.4	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik	4	Indeks SPBE	3	2,52*)	3,5	84,00
SS.5	Tersedianya SDM Aparatur Yang Profesional dan Kompeten	5	Indeks Profesionalitas ASN	71	82	90	115,49
SS.6	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	6	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	100
<i>Internal Business Process Perspective</i>						104	
SS.7	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Program & Anggaran serta Peraturan Perundang - Undangan yang Efektif	7	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai dengan Ketentuan	100	100	100	100
		8	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan	100	100	100	100

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UMUM	TARGET	REALISASI	TARGET AKHIR 2024	% CAPAIAN	
SS.8	Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan yang Prima	9	Persentase Sistem Layanan Kepegawaian yang Baik	80	94,60	100	118,25
		10	Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu	95	95,83	100	100,87
		11	Persentase Opini Publik yang Positif	70	82,50	100	117,86
		12	Persentase Pengadaan Barang & Jasa yang Tepat Waktu	100	99,05	100	99,05
SS.9	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik	13	Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan	>=5	5	>=5	100
SS.10	Terselenggaranya Pengelolaan BMN dan Layanan Sistem Informasi yang Baik	14	Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara	100	100	100	100
		15	Pemenuhan Kebutuhan Minimal Aplikasi Umum yang Terintegrasi Lingkup Kemenko Marves	4	4	4	100
<i>Learning & Growth Perspective</i>						115,82	
SS.11	Tersedianya SDM yang Kompeten di Setmenko Marves	16	Persentase SDM yang Kompeten	75	99	95	132
SS.12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Setmenko Marves	17	Nilai PMPRB Setmenko	70	90,70	80	129,57
		18	Nilai SAKIP Setmenko	75	77,20	87	102,93
SS.13	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Setmenko Marves	19	Nilai IKPA Setmenko	95	93,79	98	98,78
CAPAIAN TAHUN 2020						102,68	

Penjelasan masing-masing Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut sebagai berikut:



Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Tujuan sasaran strategis ini adalah terlaksananya peningkatan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan di Kemenko Marves. Sasaran strategis 1 (SS.1) ini dijabarkan melalui 1 IKU yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves, sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja SS.1

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	8,49	75	69,13*)	92,17
Nilai Capaian SS. 1		8,49	75	69,13*)	92,17

*) hasil penilaian KemenPAN & RB tahun 2019

Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Kemenko Marves tahun 2020 masih menunggu ditetapkan oleh KemenPAN & RB. Oleh karena itu nilai yang digunakan sementara adalah nilai hasil evaluasi Tahun 2019 yaitu 69,13. Rincian nilai hasil penilaian mandiri tersebut dan perbandingannya dengan nilai tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Hasil Penilaian RB Kemenko Marves Tahun 2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2109
A	Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,22	3,26
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,81	2,95
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,87	3,96
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,43	2,73
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,45	11,90
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	4,38	4,54
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,19	5,35
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,49	2,91
	Sub Total Komponen Pengungkit	60,00	35,84	37,60
B	Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,90	9,38
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,55	4,34
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,86	6,16
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	7,80	8,65
	Sub Total Komponen Hasil	40,00	30,11	31,53
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	65,95	69,13

Anggaran yang digunakan untuk pengelolaan reformasi birokrasi Tahun 2020 sebesar Rp.734.061.000 (tujuh ratus tiga puluh empat juta enam puluh satu ribu rupiah) atau 99,81 persen dari total anggaran Rp. 735.446.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah). Sehingga nilai efisiensi adalah sebesar 0,19%, seperti terlihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 1

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	735.446.000	734.061.000	99,81	0,19

Walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,19 persen, namun seluruh kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian target IKU Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan-kegiatan tersebut terkait pelaksanaan pada 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Dalam mendukung implementasi RB pada area Manajemen Perubahan telah dilakukan hal-hal yaitu:

- Penyampaian bukti dukung renaksi RB menuju 80% secara berkala;
- Pengisian PMPRB online tepat waktu;
- Monev quick wins secara berkala dan realisasi 100%;
- Pemberian reward kepada unit kerja Eselon I pengelolaan RB terbaik;
- Penyusunan roadmap RB Kemenko Marves 2020-2024;
- Monitoring dan evaluasi Agen Perubahan secara berkala yang output akhirnya yaitu pemberian reward kepada Agen Perubahan teladan (ditetapkan dengan penilaian 360°);
- Internalisasi Budaya Kerja, dan menjadi rekomendasi KemenPAN & RB kepada BKKBN terkait best practice sistem pengelolaan RB.

Strategi yang telah dilakukan diharapkan mampu memberikan perubahan yang signifikan pada komponen penilaian area manajemen perubahan yang memiliki bobot nilai 5,00. Pada tahun 2018 memperoleh 3,22 dan mengalami kenaikan 0,04 pada tahun 2019 yaitu 3,26. Optimisme yang dibangun mengingat pada tahun 2019 Kemenko Marves menjadi rekomendasi KemenPAN & RB kepada K/L untuk mempelajari sistem pengelolaan Reformasi Birokrasi.

2. Deregulasi Kebijakan

Target utama pada area perubahan Deregulasi Kebijakan yaitu:

- a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus;
- b. Membentuk sistem tracking penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, memperoleh JDIH Award ke-5 Nasional;
- c. Membangun *Digital Signature* bekerjasama dengan Badan Siber Sandi Negara, dan membangun Forum Koordinasi Hukum 7 K/L di bawah Kemenko Marves.

Inovasi dan pemenuhan rekomendasi yang telah dilakukan di area penataan perundang-undangan diharapkan mampu mendongkrak nilai yang diperoleh pada Tahun 2019 yaitu 3,95 dari bobot nilai 5,00. Area perubahan ini telah memperoleh prestasi luar biasa yaitu mendapatkan penghargaan anggota JDIHN peringkat 5 terbaik nasional tahun 2020.

3. Penataan Organisasi

Dalam mendukung area perubahan Penataan Organisasi telah dilakukan Prioritas Nasional yaitu:

- a. Penyederhanaan birokrasi (penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional),
- b. Kemenko Marves melalui 2 hal besar yaitu perubahan organisasi dan tata kerja 2 (dua) kali dalam setahun dengan output 2 (dua) dokumen Permenko (Permenko 2 Tahun 2020 dan Permenko 10 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Marves);
- c. Evaluasi kelembagaan Kemenko Marves mendapatkan nilai 77,27 termasuk peringkat komposit 4 (P4);
- d. Membangun sistem Ortala (Penyusunan ANJAB dan ABK berbasis sistem dan integrasi data dengan sistem HR Kepegawaian);
- e. Penyusunan dokumen Anjab dan ABK, Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).

Area perubahan organisasi memiliki tugas berat tahun 2020, yaitu mendukung pelaksanaan prioritas nasional penyederhanaan birokrasi. Kemenko Marves telah melakukan hal tersebut tepat waktu yaitu mengusulkan sebelum 31 Juni 2020. Harapannya nilai yang diperoleh tahun ini bisa naik signifikan dari nilai tahun 2019 yaitu 3,96 dari bobot 6,00.

4. Tatalaksana

Area perubahan tata laksana telah melakukan berbagai inovasi dalam mendukung terlaksananya tugas dengan baik yaitu:

- a. Sistem informasi SOP yang memudahkan dalam memonitor proses penyusunan SOP;
- b. Pembangunan *Infrastructure Management*;
- c. Integrasi Sistem (*Single Sign On*) dalam rangka mendukung pelaksanaan SPBE yang memperoleh indeks 2,52;
- d. Survei kualitas pelayanan SOP secara berkala;
- e. Penyusunan Peta Proses Bisnis yang telah dituangkan dalam SOP;
- f. Implementasi *E-Gov* Kemenko Marves melalui Marves Core yang mengintegrasikan beberapa sistem yaitu MARVES HR, MARVES LETTER, MARVES ROOM, MARVES VEHICLE, dan Integrasi Sistem HR dan Ortala.

Area perubahan tata laksana melakukan perubahan yang sangat besar pada sub komponen implementasi *E-Government*, berbagai sistem yang telah dibuat sudah diintegrasikan. Bobot nilai 5,00 telah memperoleh tahun 2019 2,73 lebih dari setengah bobot nilai. Harapannya tahun 2020 bisa memperoleh lebih tinggi lagi.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Area perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM yang telah dilakukan yaitu:

- a. Menyusun ANJAB dan ABK;
- b. Proyeksi kebutuhan pegawai jangka waktu 5 Tahun;
- c. Evaluasi jabatan;

- d. Pemberian *reward and punishment* kepada pegawai, penetapan kinerja individu;
- e. Pelaksanaan penerimaan CPNS;
- f. Seleksi terbuka JPT secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN serta di *publish* melalui kanal sosial media Kemenko Marves;
- g. Pembangunan Sistem HR untuk menghimpun data pegawai;
- h. Memperoleh Indeks Merit Sistem sebesar 184,5 masuk kategori 2, Indeks Profesionalitas ASN sebesar 80 dan menyusun manajemen *talent pool*, dan reviu Kamus Kompetensi teknis dan Standar Kompetensi Jabatan oleh KemenPAN & RB.

Area perubahan Sistem Manajemen SDM merupakan area perubahan paling besar bobot nilainya yaitu 15,00. Pada tahun 2019 nilainya yaitu 11,90 termasuk kategori baik. Harapannya tahun 2020 bisa naik signifikan dengan hal-hal yang telah dilakukan.

6. Penguatan Akuntabilitas

Dalam mendukung area perubahan penguatan akuntabilitas, Kemenko Marves berkomitmen untuk:

- a. Melibatkan pimpinan dalam berbagai kegiatan penyusunan dan monev kinerja;
- b. Membangun sistem informasi kinerja maritim berbasis *balance score card*;
- c. Secara berkala melakukan peningkatan kapasitas pegawai dalam menangani akuntabilitas kinerja; dan
- d. Melakukan benchmarking kepada K/L dan Pemerintah Daerah yang memiliki pengelolaan kinerja berpredikat AA sesuai rekomendasi Kementerian PANRB.

Area penguatan Akuntabilitas memiliki bobot 6,00, namun mempunyai pengaruh besar terhadap akuntabilitas Kementerian. Penilaian khusus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki bobot tersendiri. Kenaikan 2 (dua) tahun terakhir tidak begitu signifikan yaitu pada tahun 2018 memperoleh nilai 4,38 dan tahun 2019 4,54. Berbagai upaya *benchmarking* dengan K/L dan Pemerintah Daerah yang memiliki nilai SAKIP baik, diharapkan mampu mendongkrak nilai area perubahan penguatan akuntabilitas pada tahun 2020.

7. Penguatan Pengawasan

Pada area perubahan Penguatan Pengawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Dibangun unit pengendali gratifikasi, sosialisasi terkait gratifikasi dan dilakukan monev secara berkala;
- b. Membangun sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan Sistem SP4N-LAPOR;
- c. Komitmen melaporkan LHKPN dan LHKASN 100%, membangun Tim Peningkatan Maturitas SPIP;
- d. Bimtek dan monev SPIP secara berkala, persentase TLHP BPK Kemenko Marves tahun 2020 sangat baik mencapai 98,3%; dan
- e. Pembangunan unit ZI berpredikat WBK/WBBM yang pada Tahun 2020 Kemenko Marves berhasil 1 unit kerja ZI yang berpredikat WBK.

Area perubahan Pengawasan menjadi area perubahan kedua tertinggi bobot nilai yaitu 12,00. Area perubahan ini menjadi peran utama dalam mendukung upaya pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Area perubahan ini masih memerlukan perhatian khusus, mengingat bobot nilai yang masih jauh dari yang diharapkan. Pada tahun 2018 memperoleh nilai 5,19 dan pada tahun 2019 yaitu 5,35. Nilai tersebut masih sangat rendah bahkan belum setengah dari bobot nilai. Harapannya tahun 2020 dengan upaya yang sudah dilakukan mampu memperoleh kenaikan nilai yang signifikan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka mendukung area perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dilakukan upaya-upaya yaitu:

- a. Menyusun standar pelayanan Kemenko Marves, setiap unit kerja menyusun membuat maklumat pelayanan yang disampaikan pada website Maritim, Sistem pengaduan dan ditindaklanjuti serta di monev setiap triwulan;
- b. Membangun Sistem Kepuasan Layanan (Kepuasan layanan indeks 3,75 dari 5 kategori Puas, dan Persepsi Korupsi dengan Indeks 3,90).

Pembangunan ruang PPID Kemenko Marves, serta penggunaan kanal sosial media secara aktif dan *update*

informasi terbaru, khusus dimasa pandemi Covid-19 Kemenko Marves menerapkan tata pengelolaan pemerintahan new normal dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan seperti (*scanner* suhu tubuh, *hand sanitizer*, masker, penerapan jaga jarak di *lift* dan tombol tanpa sentuh, kebijakan WFH dan WFO bagi pegawai).

Memasuki tahun 2021, sebagai upaya peningkatan capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi, Kemenko Marves berkomitmen untuk:

1. Melakukan pembayaran tunjangan kinerja berbasis kinerja sebagai bentuk reward and punishment;
2. Integrasi sistem informasi di seluruh unit kerja Kemenko Marves;
3. Melaksanakan *whistleblowing system* dalam upaya pencegahan;
4. Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di semua unit kerja Kemenko Marves;

Capaian tahun 2020 dan 2019 serta target akhir tahun 2024 dari indikator RB Kemenko Marves, sebagai berikut:

Tabel 8. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja SS.1

No	Nama IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	69,13	69,13*)	90



Nilai indikator ini diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian PAN & RB terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kemenko Marves pada tahun berjalan. Sasaran strategis 2 (SS.2) ini dijabarkan melalui 1 IKU sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Capaian Kinerja SS.2

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Nilai SAKIP Kemenko Marves	4,63	70	68,59*)	97,99
Nilai Capaian SS. 2		4,63	70	68,59	97,99

*) hasil penilaian tahun 2019

Persentase nilai evaluasi SAKIP Kemenko Marves dicapai dari hasil evaluasi KemenPAN & RB terhadap pelaksanaan SAKIP di Kemenko Marves. Penilaian meliputi aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Nilai hasil evaluasi SAKIP Kemenko Marves tahun 2020 masih menunggu ditetapkan oleh KemenPAN & RB. Oleh karena itu nilai yang digunakan sementara adalah nilai hasil evaluasi tahun 2019 yaitu 68,59. Nilai tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang baik jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Rincian nilai SAKIP Kemenko Marves tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Rincian Penilaian SAKIP Kemenko Marves Tahun 2018 dan 2019

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2018	2019
A	Perencanaan Kinerja	30	20,94	21,07
B	Pengukuran Kinerja	25	15,95	16,12
C	Pelaporan Kinerja	15	10,85	11,01
D	Evaluasi Internal	10	6,40	6,92
E	Realisasi kinerja	20	12,85	13,47
Nilai Hasil Evaluasi		100	66,99	68,59
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Walaupun nilai SAKIP Kemenko Marves tahun 2020 belum dirilis, namun dapat diprediksi nilai SAKIP Kemenko Marves mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Membangun kinerja yang relevan; Kinerja dari level Menteri sampai level Staf *cascading*-nya terbagi habis dan tergambar dalam pohon kinerja;
2. Peningkatan Kualitas Indikator Kinerja; Melakukan revisi/perubahan Perjanjian Kinerja terutama pada kualitas indikator Eselon II dengan mempertimbangkan pendekatan proses bisnis tingkat ke deputian;
3. Pengembangan sistem aplikasi perencanaan yang terintegrasi; Integrasi sistem informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan sedang dalam tahap perancangan di Biro Komunikasi, direncanakan akhir tahun 2020 sistem sudah terintegrasi;
4. Penyiapan pedoman perencanaan; Penyusunan Pedum Perencanaan Program dan Anggaran serta Pengelolaan Kinerja lingkup Kemenko Marves;
5. Peningkatan Kualitas SDM SAKIP; melalui pelaksanaan Bimtek, *Workshop* dan *Benchmarking* SAKIP

Anggaran yang digunakan untuk layanan akuntabilitas kinerja Kemenko Marves pada tahun 2020 sebesar Rp.1.597.862.157 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) atau 92,53 persen dari target Rp. 1.726.843.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau 92,53 persen. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,47 persen (Rp.128.980.843), seperti terlihat pada Tabel 11 berikut:

Tabel 11. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 2

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Layanan Akuntabilitas Kinerja	1.726.843.000	1.597.862.157	92.53	7.47

Walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,74 persen, namun seluruh kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian target IKU Nilai SAKIP Kemenko Marves telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan-kegiatan tersebut terkait pembinaan dan penerapan SAKIP serta serangkaian koordinasi pelaksanaan pembinaan dan penyerapan SAKIP di Kemenko Marves, penyusunan, pembahasan, perumusan rencana aksi penerapan SAKIP, baik evaluasi capaian kegiatan, program, maupun Indikator Kinerja Sasaran (IKU) yang mendukung pelaksanaan SAKIP.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi adalah:

- Tingkat pemahaman SAKIP dan seluruh komponen SAKIP serta proses perencanaan dan penyusunan dokumen SAKIP;
- Komitmen pelaksanaan SAKIP yang belum maksimal;
- Ketebatasan SDM di beberapa unit kerja.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk penguatan SAKIP dan meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan beberapa juknis sebagai turunan Permenko Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemenko Marves;
2. Melakukan integrasi aplikasi terkait SAKIP;
3. Terus melakukan peningkatan kapasitas SDM SAKIP;
4. Mengintegrasikan beberapa proses SAKIP untuk mendukung penghitungan kinerja individu melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perbandingan capaian tahun 2020 dan 2019 serta target tahun 2024 dari indikator ini sebagai pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja SS.2

No	Nama IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
2.	Nilai SAKIP Kemenko Marves	68,59	68,59*)	85

*) capaian 2019



Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis

Peraturan Perundang-undangan dan harmonis yang efektif adalah peraturan perundang-undangan yang penyusunannya terkoordinasi dengan baik dan telah dilakukan harmonisasi. Hal ini merupakan salah satu tujuan dari agenda penataan peraturan perundang-undangan dalam program reformasi birokrasi, sehingga kemudian dijadikan salah satu Sasaran strategis (SS.3) yang dijabarkan oleh 1 IKU sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Capaian Kinerja SS.3

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan	6,17	3.5	2,95	84,29
Nilai Capaian SS. 3		6,17	3.5	2,95	84,29

Indikator kinerja ini diperoleh dari jumlah peraturan dievaluasi dibagi dengan jumlah target peraturan yang dievaluasi. Adapun formula penghitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Peraturan di Evaluasi}}{\text{Jumlah Target Peraturan di Evaluasi}} \times 100$$

Penghitungan atas indeks tersebut berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, yaitu:

- Telah dilakukan identifikasi peraturan yang tumpang tindih;
- Telah dilakukan revisi peraturan yang tumpang tindih;
- Instansi telah mempunyai tools untuk perubahan peraturan; serta
- Dilakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Dalam mencapai indikator ini, selama tahun 2020 Kemenko Marves telah melaksanakan serangkaian koordinasi dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, penyusunan, pembahasan, perumusan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi capaian kegiatan, program, maupun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pelaksanaan indikator ini. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020 tersebut, beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi:

- Masih minimnya SDM penyusun Peraturan-undangan di setiap unit kerja;
- Masih minimnya pendidikan dan pelatihan maupun bimtek penyusunan Peraturan-undangan yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal Kemenko Marves;
- Masih terkendala dengan lamanya waktu harmonisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan oleh Kemenkumham, setelah draf per-UU diajukan.

Belajar dari pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 yang dirangkum dari hasil monitoring dan evaluasi, maka pada tahun 2021 beberapa langkah yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja atas sasaran strategis 3 (SS.3) adalah:

1. Meningkatkan koordinasi guna pelaksanaan identifikasi peraturan yang tumpang tindih;
2. Percepatan revisi peraturan yang tumpang tindih;
3. Pengembangan dan penyempurnaan tool untuk perubahan peraturan;
4. Terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan;
5. Diklat Analisis dan Evaluasi Hukum; dan
6. Diklat Legal Drafting/Eksekutif Drafting.

Anggaran yang digunakan untuk layanan perancangan peraturan perundangan-undangan pada tahun 2020 sebesar Rp. 375.537.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Sementara realisasinya sebesar Rp 366.950.941 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau 97,71 persen dengan capaian kinerja 84,29 persen. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,29 persen (Rp 8.586.059,). Selain itu efektifitas dan efisiensi sumberdaya yang digunakan ditunjukkan

dengan jumlah peraturan yang dievaluasi di Kemenko Marves yang cukup signifikan meningkat dari tahun sebelumnya (2019), dimana terjadi peningkatan jumlah dari 39 Permenko yang telah ada ditahun 2019 menjadi 44 Permenko berikut konversi revisi dari Peraturan yang ada sebelumnya.

Tabel 14. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 3

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Layanan Perancang Peraturan Perundang-undangan	375.537.000	366.950.941	97.71	2.29

Seperti dijelaskan di atas, walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,29 persen, namun seluruh kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian target IKU Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan telah dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut terkait dengan koordinasi dan evaluasi terhadap peraturan Perundang-undangan, penyusunan, pembahasan, perumusan peraturan Perundang-undangan, baik evaluasi capaian kegiatan, program, maupun Indikator Kinerja Sasaran (IKU) yang mendukung pelaksanaan indikator ini. Perbandingan capaian tahun 2020 dan 2019 serta target 2024 dari IKU 3, sebagai berikut:

Tabel 14. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja SS.3

No	Nama IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
3.	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan	2,95	2,95	4,5



Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik

Sasaran Startegis 4 (SS.4) ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berbasis elektronik yang terpadu. Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah nilai yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan. Dasar hukum SPBE adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penyerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Nilai Indeks SPBE tahun 2020 ditargetkan sebesar 3,0. Namun sampai dengan akhir 2020 KemenPAN & RB belum mengeluarkan hasil dari penilaian. Sehingga untuk menjawab atau mengetahui hasil nilai Indeks SPBE, digunakan penilaian mandiri.

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

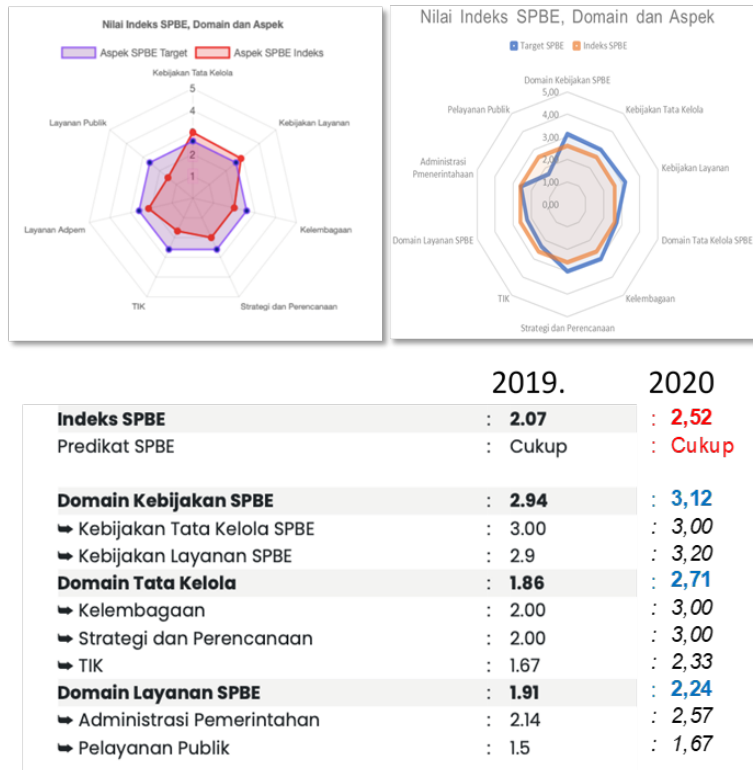
Pada tahun 2020 terdapat Peningkatan Nilai SPBE dari 2.07 (2019) menjadi 2.52*) (2020) pada skala 5, nilai tertinggi Nasional tahun 2019 yaitu 4.39. Sasaran strategis 4 (SS.4) ini dijabarkan melalui 1 IKU yaitu sebagai berikut :

Tabel 15. Capaian Kinerja SS.4

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	Indeks SPBE	4,63	3	2,52*)	84
Nilai Capaian SS. 4		4,63	3	2,52*)	84

*) berdasarkan penilaian mandiri

Nilai SPBE Tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 2,52 pada skala 5. Nilai SPBE di bawah 3 masuk kategori domain Layanan SPBE pada level INTERAKSI. Level INTERAKSI artinya masih rendahnya tingkat kematangan perencanaan dan penganggaran serta belum maksimalnya tingkat layanan data terbuka (7 K/L). Berikut diagram nilai indeks SPBE, domain dan aspek:



Gambar 7. Nilai Indeks SPBE

Beberapa kelemahan tahun 2019 berdasarkan catatan dari KemenPAN & RB telah ditindaklanjuti pada tahun 2020. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indeks SPBE tahun 2020, telah dilakukan kegiatan: 1) Penyiapan dokumen kuisisioner; 2) Penilaian mandiri SPBE dilakukan internal Kemenko Marves dan Tim dari KemenPAN & RB; 3) Penyusunan Pedoman TIK; 4) Penyusunan SK tim penilaian mandiri SPBE dan telah ditanda tangan Sesmenko Marves dan sebagai data dukung penilaian dari KemenPAN & RB pada awal bulan Desember 2020. Berikut hasil penilaian mandiri SPBE yang mengacu kepada PermenPAN & RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Resiko SPBE.

Tabel 16. Hasil Penilaian Mandiri SPBE

Indeks SPBE							2,52
Predikat SPBE							Cukup
Domain Kebijakan SPBE: 3,12		Domain Tata Kelola SPBE: 2,71			Dopmain Layanan SPBE: 2,24		
Kebijakan Tata Kelola	Kebijakan Layanan	Kelembagaan	Strategi dan Perencanaan	TIK	Administrasi Pemerintahan	Pelayanan Publik	
3,00	3,20	3,00	3,00	2,33	2,57	1,67	

Pagu anggaran pengelolaan SPBE Tahun 2020 untuk mendukung pencapaian Indeks SPBE sebesar Rp. 955.395.000 (sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Sementara realisasinya sebesar Rp. 899.648.700 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 94,17%. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 5,83 persen (Rp. 55.746.300,-) sebagaimana pada Tabel 17 berikut:

Tabel 17. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 4

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Pengelolaan Sistem Pengelolaan Berbasis Elektornik (SPBE)	955.395.000	899.648.700	94,17	5,83

Walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,83 persen, namun seluruh kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian target IKU Indeks SPBE telah dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut terkait pelaksanaan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Berbasis Elektornik (SPBE). Terdapat beberapa faktor pendukung dalam pencapaian indikator yaitu sebagai berikut:

- Adanya kebijakan dari tim penilai SPBE, tentang nilai indikator minimal 1 meskipun indikator tersebut belum tersedia;
- Adanya pemenuhan indikator layanan publik instansi pemerintah;
- Adanya peningkatan beberapa indikator layanan SPBE menjadi level 3 seperti layanan dokumentasi dan informasi hukum;
- Kompetensi SDM IT, Proses bisnis yang baku, Penggunaan teknologi tepat guna, anggaran operasional yang sesuai.

Sedangkan faktor penghambat dari pencapaian IKU ini yaitu:

- Belum tersedianya anggaran yang fokus pada penyelenggaraan SPBE sehingga penyediaan infrastruktur TIK baik dari segi kebijakan, tatakelola dan layanan belum optimal yang berdampak pada tingkat kematangan SPBE;
- Kurangnya SDM, sebagian besar waktu habis untuk urusan pendampingan vidcon pimpinan, sehingga tugas fungsi utama IT/SI tidak tertangani dengan baik.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk memenuhi target capaian IKU, yaitu:

- Menambah SDM IT yang dapat fokus menyelesaikan tusi DATSI;
- Menambah besaran alokasi anggaran yang sesuai untuk DATSI.

Perbandingan capaian tahun 2020 dan 2019 serta target 2024 dari nilai SPBE sebagai berikut:

Tabel 18. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja SS.4

No	IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
4	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,07	2,52*)	4



Tersedianya SDM Aparatur Yang Profesional dan Kompeten

Sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian yang sangat penting dari proses dan tujuan dalam pencapaian kinerja Setmenko Marves. SDM merupakan faktor kunci dalam penyelenggaraan birokrasi. Kemenko Marves sangat memerlukan dukungan SDM yang profesional dan kompeten yang berkualitas guna memenuhi tugas dan fungsinya karena SDM merupakan faktor kunci dalam penyelenggaraan birokrasi. Setmenko Marves terus berupaya menyediakan SDM yang profesional untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas lingkup Kemenko Marves. Sasaran strategis 5 (SS.5) ini dijabarkan melalui 1 IKU yaitu sebagai berikut:

Tabel 19. Capaian Kinerja SS.5

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.	Indeks Profesionalitas ASN	8,49	71	82	114%
Nilai Capaian SS. 5		8,49	71	82	114%

Berdasarkan tabel di atas, maka nilai capaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kemenko Marves adalah 82,00, dari target 71 sehingga persentase capaian sebesar 114%. Dari 35 K/L yang diukur Indeks Profesionalitas ASN, Kemenko Marves mendapat urutan nomor 3 dengan kategori tinggi. Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 merupakan penilaian dari tahun 2019. Sedangkan untuk penilaian tahun 2020, nilai Indeks Profesionalitas ASN akan keluar di tahun 2021.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Hasilnya sebagai dasar penilaian dan evaluasi tindak lanjut dalam upaya pengembangan profesionalisme pegawai ASN. Dasar hukum pengukuran adalah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dan dimensi disiplin.

Pagu anggaran TA 2020 kegiatan layanan manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian Indeks Profesionalitas ASN sebesar Rp 4.826.178.000 (empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Realisasinya sebesar Rp 4.656.411.305 (empat miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 96,48%. Dengan serapan anggaran tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,52 persen (Rp 169.766.695) sebagaimana terlihat pada Tabel 20 berikut:

Tabel 20. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 5

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	4.826.178.000	4.656.411.305	96,48	3,52

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen untuk mendapatkan data dan informasi tingkat profesionalitas pegawai ASN yang terdiri atas identitas pegawai, dimensi, deskripsi, dan indikator beserta petunjuk pengisiannya. Adapun pembobotan atas dimensi yaitu sebagai berikut:

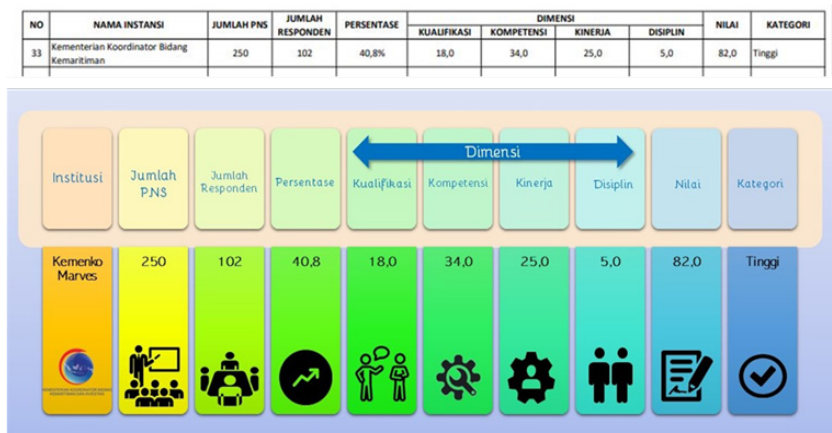
Tabel 21. Bobot dan Capaian IP ASN Kemenko Marves Tahun 2020

No	Dimensi	Bobot	Capaian
1	Kualifikasi	25%	18,0
2	Kompetensi	40%	34,0
3	Kinerja	30%	25,0
4	Disiplin	5%	5,0
Nilai			82

Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

- a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100;
- b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90;
- c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80;
- d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70;
- e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

Nilai yang didapat oleh Kemenko Marves hasil dari pengukuran BKN, dari 4 indikator perhitungan Indeks Profesionalitas ASN terlihat pada gambar berikut:



Gambar 8. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi Pusat Kementerian

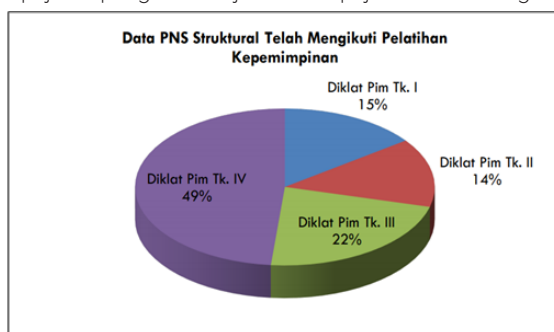
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi. Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN. Beberapa rincian capaian dimensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dimensi Kualifikasi

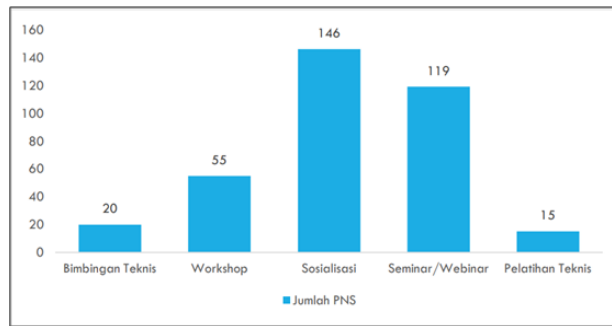
Dari total 431 ASN di lingkungan Kemenko Marves, hanya 5,3% pegawai (23 orang) yang merupakan lulusan S3, dan 30,9% (133 orang) yang merupakan lulusan S2. Lulusan dengan jumlah tertinggi adalah lulusan S1, yakni mencapai 222 orang atau 51,5% dari total pegawai. Sisanya merupakan lulusan SLTA 2 orang, dan D.IV 26 orang. Kemenko Marves ke depan merencanakan peningkatan grade calon pegawai dengan menambah formasi ASN dengan gelar S3 dan S2

- Dimensi Kompetensi

Dari total 7 Pejabat Tinggi Madya, 1 pejabat struktural telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat I. Dari keseluruhan 38 Pejabat Tinggi Pratama, sejumlah 7 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat II. Dari total 97 pejabat administrator, sejumlah 29 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat III, serta dari total 57 pejabat pengawas, sejumlah 37 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat IV.



Grafik 1. Data Pegawai Kemenko Marves Mengikuti Diklat



Grafik 1. Data Pegawai Kemenko Marves Mengikuti Diklat

Jumlah pegawai yang sudah mengikuti diklat fungsional masih sangat rendah yakni sebanyak 10 orang dan belum ada pegawai yang mengikuti diklat teknis. Namun demikian, jumlah pegawai yang telah mengikuti workshop dan seminar tercatat sebanyak 355 orang dengan rincian sebagai berikut: Masih rendahnya capaian ini dikarenakan masih rendahnya anggaran pelaksanaan diklat di lingkungan Kemenko Marves, dimana beberapa tahun terakhir anggaran Kemenko Marves masih difokuskan kepada penerimaan pegawai baru baik melalui seleksi CPNS maupun pelaksanaan biding pejabat tinggi pratama maupun pejabat tinggi madya.

- Dimensi Kinerja

Capaian dimensi kinerja dijelaskan karena masih adanya pegawai yang menyampaikan SKP tidak tepat waktu sehingga data pengukuran tidak lengkap. Untuk meningkatkan disiplin penyampaian SKP sebagai data pengukuran dimensi kinerja, Kemenko Marves menerapkan sanksi atas keterlambatan.

Beberapa kendala dalam upaya meningkatkan profesionalitas ASN, diantaranya sebagai berikut:

- Masih rendahnya tingkat kedisiplinan dalam pengumpulan SKP.
- Masih minimnya ASN yang mengikuti jenjang diklat PIM, Fungsional atau Teknis.
- Kualifikasi pendidikan yang belum merata dan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Masih sedikitnya pelaksanaan dan keikutsertaan dalam seminar, *workshop*, kursus, atau magang.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja, Kemenko Marves mengalokasikan anggaran diklat melalui kegiatan Layanan Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai sebesar Rp.1.527.180.000,-. Untuk meningkatkan kualifikasi pegawai baik melalui diklat kepemimpinan, diklat fungsional, dan teknis serta seminar dan *workshop*. Perbandingan capaian atas IKU ini tahun 2020 dan 2019 serta target tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 22. Perbandingan Capaian dan Target SS.5

No	IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
5	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	82	81





Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan IKU dari SS.6, maksud dari SS ini adalah pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Kemenko Marves yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sasaran dan target TA 2020 adalah opini BPK hasil pelaksanaan penggunaan anggaran pada TA 2019. Hal ini karena opini BPK TA 2019 baru disampaikan pada akhir triwulan I atau triwulan II TA 2020. Realisasi atas IKU 6 tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 23. Capaian Kinerja SS.6

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	6.17	WTP	WTP	100
Nilai Capaian SS. 6		6.17	WTP	WTP	100

BPK kembali memberikan predikat WTP (100%) atau dengan target yang ditetapkan. Kemenko Marves dalam pengelolaan mulai tahun kedua setelah pelaporan penggunaan anggaran satker tersendiri (DIPA 2015), telah berhasil mencatatkan laporan keuangan yang wajar dalam pemeriksaan BPK (TA. 2016) dengan predikat WTP. Predikat WTP ini telah berhasil dipertahankan untuk 4 tahun anggaran berturut-turut (2016, 2017, 2018, 2019).

Pagu anggaran TA 2020 kegiatan Layanan Manajemen Keuangan untuk mendukung pencapaian Opini BPK atas Laporan Keuangan sebesar Rp 3.218.705.000 (tiga miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah). Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 3.069.050.677 (tiga miliar enam puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 95,35 persen dengan capaian kinerja 100 persen. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,65% (Rp 149.654.323).

Tabel 24. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 6

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Layanan Manajemen Keuangan	3.218.705.000	3.069.050.677	95,35	4,65

Walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,95 persen, namun seluruh kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian target IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan telah dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut terkait pencapaian opini WTP yaitu pengawasan dan pengendalian, menyusun petunjuk teknis, dan menyusun perumusan standar, serta sosialisasi peraturan terkait dengan pengelolaan anggaran, pemberian pendampingan dan konsultasi terhadap unit kerja dalam pelaksanaan anggaran.

Setidaknya terdapat tiga faktor pendukung pencapaian opini WTP, yaitu pengungkapan informasi secara jelas dan detail, baiknya sistem pengendalian internal di Kemenko Marves sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun anggaran dan teknologi informasi. Pada TA. 2020, Kemenko Marves juga telah melaksanakan efektifitas kegiatan yang berimbang pada efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran dan manusia) yang digunakan, dengan menerapkan penyusunan jumlah anggaran yang dibutuhkan secara proporsional dan akuntabel.

Namun, pencapaian opini ini tidak luput pula dari beberapa tantangan. Seperti kelemahan dalam pengelolaan aset tetap dan kelemahan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu beberapa faktor yang dapat menghambat tercapainya opini WTP yang terkait Sistem Pengendalian Internal diantaranya:

- Penatausahaan persediaan belum memadai;
- Penatausahaan aset tetap belum memadai;

- Perencanaan, penganggaran dan pengawasan internal terhadap belanja belum memadai;
- Pelaksanaan perjalanan dinas belum didukung dengan sistem pengendalian yang memadai.

Atas hambatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kemenko melalui:

- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap tertib administrasi pelaksanaan penatausahaan persediaan terutama barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan;
- Menindaklanjuti kesepakatan dengan BPPT terhadap Aset Tetap Renovasi;
- Menyusun perumusan standar, kebijakan serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara khususnya terkait perencanaan dan penganggaran yang memadai, kemudian mensosialisasikan sistem pengendalian tersebut dan menerapkannya dilingkungan Kemenko Marves;
- Menyusun petunjuk teknis tentang perjalanan dinas sesuai dengan proses bisnis pada Kemenko Marves secara komprehensif dan detail mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban, kemudian mensosialisasikan juknis tersebut dan diterapkan secara menyeluruh oleh setiap unit kerja di lingkungan Kemenko Marves.

Upaya lain yang telah dilaksanakan oleh Kemenko Marves dalam rangka pencapaian Opini terbaik atas Laporan Keuangan Kemenko Marves, antara lain:

- Sosialisasi peraturan terkait dengan pengelolaan anggaran, pemberian pendampingan dan konsultasi terhadap unit kerja dalam pelaksanaan anggaran;
- Meningkatkan peran aktif Inspektorat Kemenko Marves;
- Program peningkatan jumlah dan kapasitas pengelola keuangan melalui kegiatan berupa sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat penyusunan pertanggungjawaban keuangan;
- Melakukan update standar operasi prosedur (SOP) dan aturan internal lainnya sebagai bentuk kepatuhan (*compliance*);
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu dalam penyelesaian pekerjaan.

Perbandingan capaian atas IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan tahun 2020 dan 2019 serta target tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 25. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja SS.7

No	IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
6	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP



Sasaran Strategis 7 (SS.7) ini akan terlaksana ketika terlaksananya peningkatan perencanaan program, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta peraturan perundang-undangan yang efektif. SS.7 ini dijabarkan melalui 2 IKU yaitu sebagai berikut :

Tabel 26. Capaian Kinerja SS.7

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
7.	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai dengan Ketentuan	3,09	100	100	100
8.	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan	6,95	100	100	100
Nilai Capaian SS. 7					100

Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai dengan Ketentuan

Dokumen perencanaan program yang sesuai ketentuan merupakan pedoman instansi pemerintah dalam melaksanakan program/kegiatan. Di dalam dokumen perencanaan program telah ditetapkan target kinerja dan besaran anggaran yang dibutuhkan. Unit kerja dalam melaksanakan program/kegiatan harus berpedoman pada

dokumen perencanaan. Namun seringkali karena berbagai kondisi dan kebutuhan, baik eksternal maupun internal, rencana yang sudah dibuat harus berubah. Dokumen perencanaan program Kemenko Marves yaitu: Dokumen Renstra Kemenko Marves; Dokumen Renstra Unit Kerja Eselon I; Dokumen Renstra Unit Kerja Eselon II; Dokumen Renja Kemenko Marves; Dokumen Renja Unit Kerja Eselon I; Dokumen Renja Unit Kerja Eselon II; dan Dokumen DIPA.

Pagu anggaran TA 2020 kegiatan Layanan Perencanaan Program dan Anggaran untuk mendukung pencapaian Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai dengan Ketentuan sebesar Rp 5.613.465.000 (lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah). Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 5.549.313.662 (lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau 98,86 persen dengan capaian kinerja 100 persen. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,14 persen (Rp 64.151.338) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 27. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 7

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	5.613.465.000	5.549.313.662	98,86	1,14

Walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,14 persen, namun seluruh kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian target IKU Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai dengan Ketentuan telah dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagai berikut: koordinasi pelaksanaan penyusunan, pembahasan, perumusan Renstra Kemenko Marves, Renstra Setmenko Marves, Renstra Biro Perencanaan serta pendampingan dan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya yang ada di unit kerja lingkup Kemenko Marves, baik evaluasi capaian kegiatan, program, maupun Indikator Kinerja Sasaran (IKU) yang mendukung terhadap dokumen perencanaan (Renstra Tahun 2020 - 2024 dan RKT Tahun 2020).

Kendala/permasalahan yang dihadapi adalah terlambatnya penetapan Renstra baik itu Kemenko maupun unit kerja hal ini karena adanya perubahan restrukturisasi yang mulai efektif pada bulan Juni tahun 2020, sehingga dalam tahap penyusunan Renstra unit kerja menunggu hasil rekomendasi dari KemenPAN & RB terhadap SOTK Kemenko Marves atas pengusulan unit "baru" kerja Kemenko Marves.

Rekomendasi/tindak lanjutnya untuk mencapai indikator tersebut yaitu setelah adanya ketetapan dan pengesahan usulan SOTK baru disetujui oleh KemenPAN & RB, tim penyusun dokumen perencanaan langsung menindaklanjuti dengan penyusunan dan penetapan atas dokumen perencanaan (Renstra) baik itu Kemenko Marves maupun unit kerja di lingkup Kemenko Marves.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai dengan Ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan unit kerja maupun K/L terkait, sehingga adanya penyesuaian dalam mencapai target capaian setiap tahunnya;
2. Melakukan reviu terhadap semua dokumen perencanaan yang telah ditetapkan guna penyesuaian dengan aturan perundangan/kebijakan yang baru.

Perbandingan capaian tahun 2020 dan 2019 serta target tahun 2024 atas IKU 7 sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 7

No	Nama IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
7.	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai dengan Ketentuan	100	100	100

Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan

Indikator kinerja tersebut dihitung dari perbandingan persentase jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil diharmonisasi dibandingkan dengan jumlah seluruh peraturan perundang-undangan yang sedang disusun.

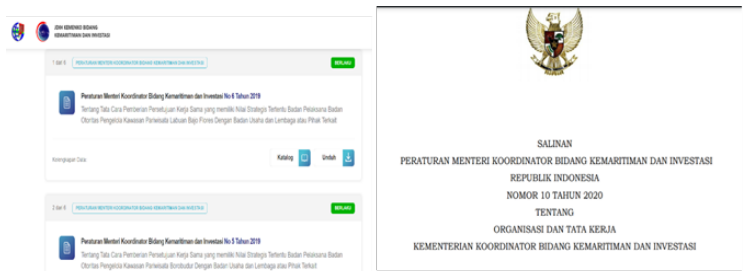
Formulasi Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator (P3MK) dapat diaplikasikan dan disesuaikan dengan kinerja Biro Hukum Kemenko Marves dengan gambaran formulasi rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Peraturan Perundang – undangan yang berhasil diharmonisasi}}{\text{Jumlah seluruh peraturan perundang – undangan yang sedang disusun}} \times 100\%$$

Jumlah peraturan perundang-undangan yang telah diharmonisasi selama tahun 2020 adalah sebanyak 14 Rancangan Permenko, sedangkan rancangan Permenko yang telah ditetapkan menjadi Permenko sebanyak 10 Rancangan. Sedangkan 4 Rancangan Permenko lainnya dalam proses pengesahan, sehingga angka yang didapat melalui rumus diatas sebagai berikut:

$$\frac{14}{14 (10 \text{ Permenko final} + 4 \text{ Rpermenko})} \times 100\% = 100\%$$

10 Rancangan Permenko yang telah disahkan menjadi Permenko tersebut telah di *upload* dan dipublikasikan melalui JIDH Kemenko Marves Tahun 2020.



Gambar 1. Rancangan Rpermenko yang telah disahkan menjadi Permenko dan di upload JIH Kemenko Marves

Anggaran yang digunakan untuk pencapaian target IKU tersebut, adalah sebesar Rp. 1,705,401,749 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dari target sebesar Rp. 1,725,564,000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau terealisasi sebesar 98,83 persen. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 1,17 persen (Rp. 20.162.251,-) yang terlihat seperti pada Tabel 29 berikut ini:

Tabel 29. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 8

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Layanan Perancangan Peraturan Perundang-undangan	1,725,564,000	1,705,401,749	98.83	1,17

Walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,17 persen, namun seluruh kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian target IKU Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang diharmonisasi pada Tahun Berjalan telah dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah Layanan Perancangan Peraturan Perundang-undangan yaitu: koordinasi, penyusunan, pembahasan, perumusan Peraturan Perundang-undangan, baik evaluasi capaian kegiatan, program, maupun Indikator Kinerja (IKU).

Kendala/permasalahan yang dihadapi selama tahun 2020 adalah lamanya proses pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disebabkan oleh terbatasnya SDM tim harmonisasi dari Kemenkumham.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, bulanan, dan triwulanan terhadap RPUU yang diajukan oleh unit kerja dari awal penyusunan sampai dengan ditetapkan; dan
2. Melakukan koordinasi yang telah terjalin dengan tim harmonisasi dari Kemenkumham.

Perbandingan capaian tahun 2020 dan 2019 serta target tahun 2024 atas IKU 8 sebagai berikut:

Tabel 30. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 8

No	IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
8.	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan	100	100	100





Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan yang Prima

Sasaran strategis 8 (SS.8) ini dijabarkan melalui 4 IKU yaitu sebagai berikut :

Tabel 31. Capaian Kinerja SS.8

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
9	Persentase Sistem Layanan Kepegawaian yang Baik	0,46	80	94,60	118,25
10	Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu	3,86	95	95,83	100,87
11	Persentase Opini Publik yang Positif	6,95	70	82,50	117,86
12	Persentase Pengadaan Barang & Jasa yang Tepat Waktu	3,86	100	99,05	99,05
Nilai Capaian SS. 8					109

Persentase Sistem Layanan Kepegawaian yang Baik

Tujuan dari indikator ini adalah untuk mengukur tingkat layanan yang baik dari sistem layanan kepegawaian. IKU ini dihitung dengan membandingkan persentase layanan kebutuhan administrasi pegawai yang diberikan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai kaidah yang berlaku. Berbanding dengan seluruh layanan yang diberikan Target capaian pada indikator kinerja ini adalah 80%. Realisasi capaian IKU melampaui target sebesar 94,60 atau sebesar 118,25 persen. Komponen yang menentukan ketercapaian target IKU tersebut adalah layanan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun.

1. Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

KGB pertama kali bagi PNS yang diangkat dalam golongan ruang I, II dan III diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 tahun sejak diangkat menjadi CPNS dan selanjutnya 2 tahun sekali, kecuali untuk CPNS yang pertama kali diangkat dalam golongan ruang II/a diberikan KGB pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 tahun dan selanjutnya setiap 2 tahun sekali.

Persyaratan KGB yaitu telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala serta memiliki Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya "CUKUP". Mekanisme perhitungan KGB, yaitu komponen menghitung KGB berdasarkan masa kerja di Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dan TMT berlakunya Keputusan tersebut atau berdasarkan masa kerja dan TMT pada KGB yang terakhir. Golongan I dan II KGB akan naik tiap masa kerja GANJIL, sedangkan Golongan III dan IV KGB akan naik tiap masa kerja GENAP.

2. Mutasi Pegawai Negeri Sipil

Dalam hal pelaksanaan mutasi masuk dan keluar, Kemenko Marves selalu berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Sesuai dengan aturan dari BKN tersebut, sebelum dilakukan proses mutasi di BKN, Bagian Kepegawaian Kemenko Marves melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen mutasi dari masing-masing pegawai. Apabila berkas mutasi pegawai tersebut telah lengkap dan sudah benar, maka mutasi pegawai tersebut akan diproses ke BKN.

3. Kenaikan Pangkat

Sesuai dengan aturan BKN, periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

4. Pensiun

Berdasarkan Undang-undang No.43 Tahun 1999 Pasal 10, Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saia sebagai jaminan hari tua. tetapi iudaa adalah sebagai balas iasa. maka Pemerintah

memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri.

Anggaran yang digunakan untuk pencapaian indikator kinerja utama tersebut adalah sebesar Rp. 4.656.411.305 (empat milyar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus lima rupiah) atau 96,48% dari target Rp. 4.826.178.000 (empat milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian terdapat efisiensi 3,52 persen, sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 32. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 9

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	4.826.178.000	4.656.411.305	96,48	3.52

Walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,52 persen, namun seluruh kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian target IKU Persentase Sistem Layanan Kepegawaian yang Baik telah dilaksanakan yaitu layanan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun. Adapun Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2021 meliputi peningkatan layanan kenaikan gaji berkala, layanan kenaikan pangka, mutasi, dan pensiun. Perbandingan capaian tahun 2020 dan 2019 serta target tahun 2024 atas IKU 9 sebagai berikut:

Tabel 33. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 9

No	Nama IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
9	Persentase Sistem Layanan Kepegawaian yang Baik	80	94,60	100

Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat ketertiban/kepatuhan dalam penyelesaian tagihan atas beban negara secara tepat waktu. Realisasi capaian IKU ini dihitung dengan melakukan perbandingan antara penyelesaian tagihan atas beban negara yang tepat waktu dibandingkan dengan total tagihan beban negara dikali 100 persen. Tepat waktu artinya tagihan dapat diselesaikan paling lambat dalam 17 hari kerja setelah menjadi hak tagih kepada negara sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Target nilai capaian untuk indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 95%. Realisasi capaian IKU tahun 2020 melampaui target yakni sebesar 95,83 %.

Anggaran yang digunakan untuk pencapaian IKU tersebut sebesar Rp. 3.069.050.677 (tiga milyar enam puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 95,35% dari target Rp. 3.218.705.000 (tiga milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah), berada pada kegiatan layanan manajemen keuangan. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,65 persen (Rp.149.654.323,-), seperti pada tabel berikut.

Tabel 34. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 10

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Layanan Manajemen Keuangan	3.218.705.000	3.069.050.677	95,35	4,65

Walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,65 persen, namun Setmenko telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan layanan manajemen keuangan dalam rangka mendorong pencapaian target IKU tersebut yang meliputi pelaksanaan koordinasi baik evaluasi capaian kegiatan, program, maupun IKU yang mendukung pelaksanaan layanan manajemen keuangan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU adalah masih ada keterlambatan penyelesaian tagihan

sebesar sekitar lima persen (Target 2020 = 95, idealnya target capaian IKU 100) artinya masih ada ruang perbaikan yang dapat dikerjakan sehingga pada tahun-tahun berikutnya persentase penyelesaian tagihan yang tepat waktu dapat ditingkatkan atau semakin mendekati 100%.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian tagihan tepat waktu, sehingga capaian kinerja semakin mendekati 100%;
2. Melakukan koordinasi dan monitoring ke setiap unit kerja atas penyelesaian tagihan menjadi tepat waktu.

Perbandingan capaian tahun 2020 dan 2019 serta target tahun 2024 atas IKU 10 sebagai berikut:

Tabel 35. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 10

No	IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
10	Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu	95	95,83	100

Persentase Opini Publik yang Positif

IKU ini bertujuan untuk menilai seberapa besar dampak kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemenko Marves telah dianggap baik melalui opini yang positif. Opini positif berita yang menggunakan diksi dan pemilihan bahasa yang mengunggulkan dan atau meninggikan pernyataan Kemenko Marves. Hal ini dilakukan dengan pelaksanaan media monitoring guna menganalisa pemberitaan yang positif, netral atau negatif. Media yang dijadikan basis penilaian adalah media *online* utama (*mainstream*) yang mempunyai pembaca dalam jumlah besar. Target capaian pada indikator ini adalah 70% yang ditargetkan pada akhir tahun (triwulan IV).

Formulasi dari IKU tersebut adalah dengan membagi jumlah opini publik positif dalam pemberitaan dengan jumlah pemberitaan media massa.

$$\frac{\text{Jumlah Opini Publik Positif}}{\text{Jumlah Opini Publik yang Diolah}} \times 100\%$$

Persentase capaian IKU ini adalah 82,5 persen yang didapatkan dari jumlah total pemberitaan dengan opini positif pada triwulan IV tahun 2020 sebanyak 7.362 opini positif dan total opini publik yang didapatkan dari pemberitaan adalah 8.920 sebagaimana pada penghitungan berikut:

$$\frac{7.362}{8.920} \times 100\% = 82,5\%$$

Anggaran yang digunakan untuk pencapaian IKU ini adalah sebesar Rp. 1.548.263.618 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah) atau 99,81% dari target Rp. 1.551.222.000 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 0,19 persen (Rp. 2.958.382,-) seperti pada tabel berikut ini:

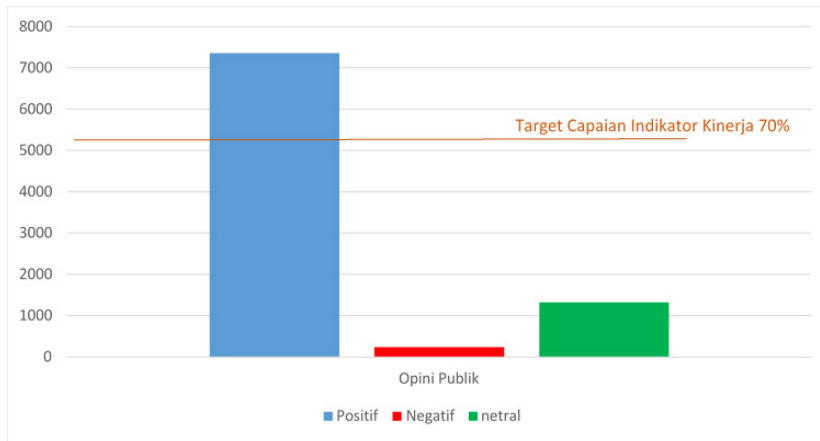
Tabel 36. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 11

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Pengelolaan Opini Publik	1.551.222.000	1.548.263.618	99,81	0,19

Walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,19 persen, namun seluruh kegiatan pengelolaan opini publik dalam rangka mendorong pencapaian target IKU tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap media terkait pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik dan bekerja sama dalam peliputan maupun pemberitaan terkait

Kemenko Marves.

Adapun rencana yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja antara lain: kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik dalam hal peliputan dan pemberitaan Kemenko Marves serta pengurangan sentimen netral maupun negatif. Berikut grafik tentang sentimen opini publik sepanjang tahun 2020:



Grafik 1. Sentimen Opini Publik

Perbandingan capaian tahun 2020 dan 2019 serta target tahun 2024 atas IKU 11 sebagai berikut:

Tabel 37. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 11

No	IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2020
11	Persentase Opini Publik yang Positif	70	82,50	100

Persentase Pengadaan Barang & Jasa yang Tepat Waktu

IKU ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pengadaan barang & jasa di lingkup Kemenko Marves telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Perencanaan pengadaan yang telah dirancang dan mengikuti seluruh timeline yang telah disepakati. IKU ini dihitung dengan membandingkan jumlah pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu sesuai rencana umum pengadaan berbanding dengan total seluruh pengadaan barang dan jasa dikali 100 persen.

$$\frac{\text{Jumlah pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu sesuai rencana umum pengadaan}}{\text{Total seluruh pengadaan barang dan jasa}} \times 100$$

Anggaran yang digunakan untuk pencapaian IKU tersebut adalah sebesar Rp. 303.456.515 (tiga ratus tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah) atau 99,30 persen dari target Rp. 305.588.000 (tiga ratus lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.131.485,- (0,70 persen) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 38. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 12

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Pengadaan Barang dan Jasa	305.588.000	303.456.515	99,30	0,70

Walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,70 persen, namun seluruh kegiatan Pengadaan Barang

dan Jasa dalam rangka mendorong pencapaian target IKU Persentase Pengadaan Barang & Jasa yang Tepat Waktu telah dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu: koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pendataan terkait kebutuhan barang dan jasa di seluruh unit kerja lingkup Kemenko Marves.

Perbandingan capaian tahun 2020 dan 2019 serta target tahun 2024 atas IKU 8 sebagai berikut:

Tabel 39. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 12

No	IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2020
12	Persentase Pengadaan Barang & Jasa yang Tepat Waktu	90	99,05	100



Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik

Sasaran strategis 9 (SS.9) ini dijabarkan melalui 1 IKU yaitu Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan, jumlah Pedoman Umum (Pedum) Manajerial yang ditetapkan yang terdiri 2 pedum di Biro Perencanaan, 2 Pedum di Biro Umum, dan 2 Pedum di Biro Hukum. Adapun Pedum yang telah ditetapkan sebagai berikut: Pedum Analisi Jabatan (Anjab); Pedum Analisis Beban Kinerja (ABK); Pedoman Umum Pengembangan Pegawai; Pedoman Umum Pemberian Penghargaan PNS; Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan. 2 pedum yang ada di Biro Perencanaan yaitu Pedoman Umum Penyusunan Anggaran dan Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan Program belum terlaksana karena adanya perubahan SOTK dan penyusunan anggaran SOTK baru, sehingga ditunda terlebih dahulu dan dialihkan ke tahun 2021. Capaian atas SS.9 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 40. Capaian Kinerja SS.9

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
13	Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan	6,17	>=5	5	100
Nilai Capaian SS. 9		6,17	>=5	5	100

Tersedianya dokumen dan/atau rancangan administrasi untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik adalah tersedianya dokumen pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan di Kemenko Marves.

Untuk mendukung pencapaian atas indikator kinerja Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan dengan kegiatan yang tersebar di 3 biro Setmenko Marves. Anggaran yang digunakan untuk pencapaian IKU masing-masing kegiatan yaitu:

- 1) Penataan dan Evaluasi Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja pagu anggaran Rp. 167.021.000,- (seratus enam puluh tujuh juta dua puluh satu rupiah) dengan realisasi Rp. 166.785.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu) (99,86%) tingkat efisiensi 0,14 persen (Rp. 2.797.500);
- 2) Perencanaan dan Pengembangan Pegawai dengan pagu anggaran Rp. 2.775.366.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 2.707.451.117,- (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah) (97,55%) dengan tingkat efisiensi 2,45 persen (Rp. 67.914.883); dan
- 3) Pengelolaan perbendaharaan dengan pagu anggaran Rp. 510.506.000,- (lima ratus sepuluh juta lima ratus enam ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 502.340.144,- (lima ratus dua juta tiga ratus empat puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah) (98,40%) dengan tingkat efisiensi 1,60 persen (Rp. 8.165.856,-).

Hal ini sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 41. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 13

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Penataan dan Evaluasi Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja	167.021.000	166.785.000	99,86	0,14
2	Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	2.775.366.000	2.707.451.117	97,55	2,45
3	P e n g e l o l a a n perbendaharaan	510.506.000	502.340.144	98,40...	1,60
Total					4,19

Walaupun terdapat efisiensi anggaran dari 3 kegiatan sebesar 4,19 persen, namun seluruh kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian target IKU Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan telah dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

- Telah ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menandatangani Permenko Marves Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Telah ditetapkannya Pedum Analisis Jabatan (Anjab);
- Telah ditetapkan Pedum Analisis Beban Kinerja (ABK);
- Telah ditetapkan Pedoman Umum Pengembangan Pegawai;
- Telah ditetapkannya Pedoman Umum Pemberian Penghargaan PNS;
- Telah ditetapkannya Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan.

Adapun rencana yang akan dilakukan pada tahun 2021, untuk meningkatkan kinerja antara lain: Penyusunan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran dan Penyusunan Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan Program.

Perbandingan capaian tahun 2020 dan 2019 serta target 2024 dari IKU 13 sebagai berikut:

Tabel 42. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja SS.9

No	Nama IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
13	Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan	>5	5	>5



Sasaran strategis 10 (SS.10) ini dijabarkan melalui 2 IKU yaitu sebagai berikut:

Tabel 43. Capaian Kinerja SS.10

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
14	Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara	3,86	100	100	100
15	Pemenuhan Kebutuhan Minimal Aplikasi Umum yang Terintegrasi Lingkup Kemenko Marves	4,63	4	4	100
Nilai Capaian SS. 10					100

Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara

Presentase Laporan BMN di lingkup Kemenko Marves yang akuntabel dan tepat waktu. Barang milik negara adalah segala jenis sarana prasarana yang diadakan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan masing masing tugasnya. Pengadaan Barang Milik Negara menggunakan anggaran dari pemerintah melalui instansi terkait, sehingga setiap BMN yang diserahkan untuk digunakan oleh aparatur perlu dilakukan monitoring

melalui pelaporan. Ketaatan pelaporan akan membantu memperlancar setiap pekerjaan administrasi. Tahun 2020 indikator tersebut memiliki target capaian sebesar 100%.

Berdasarkan kecenderungan data dari beberapa tahun terakhir, target dalam Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara yaitu sebesar 100%. Target capaian 100% didapat dari formula penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) yang ditargetkan dapat dipenuhi penyampaiannya sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan atau sebelum berakhir tenggat waktu. Kegiatan pendukung atas capaian indikator Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara yaitu Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN).

Anggaran yang digunakan untuk pencapaian IKU ini adalah sebesar Rp. 300.566.000 (tiga ratus juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan realisasi Rp. 284.473.841 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) (94,65%) sedangkan tingkat efisiensi anggaran tercapai persen 5,35 (Rp.16.092.159), hal ini terlihat pada tabel berikut:

Tabel 44. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 14

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)	300.566.000	284.473.841	94,65	5,35

Walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,35 persen, namun seluruh kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian target IKU Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan-kegiatan tersebut terkait pelaksanaan layanan BMN yaitu: koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas layanan manajemen BMN, capaian indikator ini telah tercapai pada TW II tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketaatan penyampaian laporan BMN sangat baik.

Adapun rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja antara lain: melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat ketaatan penyampaian BMN, mendorong unit kerja untuk melaksanakan pelaporan BMN yang tepat waktu. Perbandingan atas capaian atas IKU 14 tahun 2020 dan 2019 serta target 2024 sebagai berikut:

Tabel 45. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 14

No	Nama IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
14	Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara	100	100	100

Pemenuhan Kebutuhan Minimal Aplikasi Umum yang Terintegrasi Lingkup Kemenko Marves

IKU ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan minimal aplikasi umum yang terintegrasi lingkup Kemenko Marves dinilai melalui jumlah aplikasi umum yang diintegrasikan. Target capaian pada indikator ini adalah sebesar 4 aplikasi:

1. Marveshr.maritim.go.id, yaitu aplikasi kepegawaian;
2. Marvesletter.maritim.go.id, yaitu aplikasi persuratan;
3. Marvesroom.maritim.go.id, yaitu aplikasi peminjaman ruang rapat;
4. Marvesvehicle.maritim.go.id, yaitu aplikasi ketersediaan kendaraan dinas.

Anggaran yang digunakan untuk pencapaian IKU tersebut dengan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi sebesar Rp. 1.903.992.009,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Sembilan rupiah) atau 92,80 persen dari target Rp. 2.051.737.000, (dua milyar lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan demikian terdapat efisiensi 7,20 persen (Rp. 147.734.991,-), sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 46. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 15

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Pengelolaan Sistem Informasi	2.051.737.000	1.903.992.009	92,80	7,20

Walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,20 persen, namun seluruh kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dalam rangka mendorong pencapaian target IKU Pemenuhan Kebutuhan Minimal Aplikasi Umum yang Terintegrasi Lingkup Kemenko Marves telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu: telah melaksanakan kegiatan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan integrasi antar sistem informasi dilakukan secara rutin dengan melakukan rapat koordinasi antara pemilik proses bisnis (unit kerja), pengembang aplikasi dan dari Setmenko Marves sebagai mediator. Sejauh ini tingkat integrasi aplikasi yang berhasil diimplementasikan adalah pada layer pertama berupa integrasi *login* menggunakan *Lightweight Directory Access Protocol* (LDAP) sebagai basis *Single Sign On* kedepannya, dan tes integrasi 4 aplikasi menggunakan LDAP tersebut diatas sudah terpenuhi. Tetapi dari sisi fitur aplikasi masih terus dalam tahap penyelesaian oleh pengembang.

Tabel 47. Rincian Aplikasi Umum di Lingkungan Kemenko Marves

No	Aplikasi	Jenis	Fungsi	Keterangan
1	Marves HR	Aplikasi Pemerintahan berbasis Web	Merekam data personal pegawai Kemenko Marves, membentuk daftar riwayat hidup dari data pegawai,	<ul style="list-style-type: none"> Telah Terintegrasi dengan LDAP. Telah terintegrasi dengan <i>Letter</i>, <i>Room</i> dan <i>Vehicle</i>. Menyediakan pembuatan service yang dinamis bagi aplikasi lain agar data pegawai dapat dikolaborasi.
2	Marves <i>Letter</i>	Aplikasi Pemerintahan berbasis Web	Merekam pencatatan persuratan baik masuk maupun keluar.	<ul style="list-style-type: none"> Telah terintegrasi dengan LDAP Telah terintegrasi dengan Marves HR Akan menyediakan service bagi aplikasi lain agar data surat dapat dikolaborasi.
3	Marves <i>Room</i>	Aplikasi pemerintahan berbasis Web	Merekam pencatatan pemesanan ruang rapat	<ul style="list-style-type: none"> Telah terintegrasi dengan LDAP Telah terintegrasi dengan Marves HR Telah menyediakan service bagi aplikasi lain agar data pemesanan ruang rapat dapat dikolaborasi namun sifatnya masih statis (belum dinamis)
4	Marves <i>Vehicle</i>	Aplikasi Pemerintahan berbasis Web	Merekam pencatatan peminjaman kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> Telah terintegrasi dengan LDAP Telah terintegrasi dengan Marves HR Akan menyediakan service bagi aplikasi lain agar data peminjaman kendaraan dapat dikolaborasi namun sifatnya masih statis (belum dinamis)

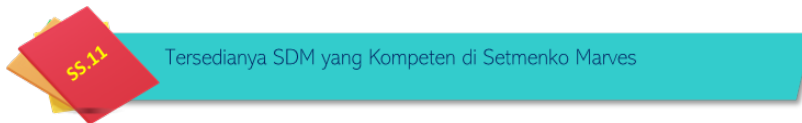




Adapun rencana yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja antara lain peningkatan pengelolaan layanan informasi di Kemenko Marves dan lanjutan integrasi sistem aplikasi yang ada di Kemenko Marves. Perbandingan atas capaian IKU 15 tahun 2020 dengan tahun 2019, serta target 2024 sebagai berikut:

Tabel 48. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 15

No	IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
15	Pemenuhan Kebutuhan Minimal Aplikasi Umum yang Terintegrasi Lingkup Kemenko Marves	4	4	4



Sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian yang sangat penting dari proses dan tujuan dalam pencapaian kinerja Setmenko Marves. Setmenko Marves sangat memerlukan dukungan SDM yang profesional dan kompeten yang berkualitas guna memenuhi tugas dan fungsinya karena SDM merupakan faktor kunci dalam penyelenggaraan birokrasi. Sasaran strategis 11 (SS.11) ini dijabarkan melalui 1 IKU yaitu sebagai berikut :

Tabel 49. Capaian Kinerja SS.11

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
16	Persentase SDM yang Kompeten	3,86	75	99	132
Nilai Capaian SS. 11		3,86	75	99	132

Persentase SDM tersebut dikalkulasi dengan menghitung jumlah pejabat di Setmenko yang sesuai kompetensi sesuai tugas dan fungsinya. Target nilai capaian pada indikator ini adalah sebesar 75, capaian tahun 2020 mencapai 99, sampai dengan saat ini SDM yang kompeten di Kemenko Marves sudah mulai terpenuhi sesuai dengan keahlian dan bidang ilmunya.

Dalam penghitungan IKU.16 ini penilaian kompetensi hanya pada dua indikator, yaitu kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Penilaian kompetensi teknis tidak dilakukan, karena setelah standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara yang terkait deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan belum ditetapkan.

Untuk skema pengukuran SDM yang kompeten, dilakukan berdasarkan Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang diatur dalam PermanPAN & RB Nomor 38 Tahun 2017. Adapun indikator dari persentase SDM yang kompeten antara lain: Standar Kompetensi Manajerial, meliputi: Integritas; Kerja sama; Komunikasi; Orientasi pada hasil; Pelayanan Publik; Pengembangan diri dan Orang lain; Mengelola Perubahan; serta Pengambilan Keputusan. Sedangkan untuk penilaian Standar Kompetensi Sosio Kultural dengan satu komponen

yaitu: Perekat Bangsa.

Anggaran yang digunakan untuk pencapaian atas indikator Persentase SDM yang Kompeten, dengan pagu anggaran, sebesar Rp. 4.656.411.305,- (empat milyar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus lima rupiah) atau 96,19 persen dari target Rp. 4.826.178.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 3,81 persen (Rp. 169.766.695), seperti terlihat pada Tabel 52 berikut ini:

Tabel 50. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 16

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	4.826.178.000	4.656.411.305	96.19	3.81

Walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,81 persen, namun seluruh kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian target IKU Persentase SDM yang Kompeten telah dilaksanakan dengan baik. Langkah-langkah yang dilakukan, sepanjang tahun 2020 yaitu:

1. Integritas, konsisten mendorong pegawai Kemenko Marves untuk berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya;
2. Kerja sama, menciptakan kemampuan untuk menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi;
3. Komunikasi, mendorong pegawai Kemenko Marves untuk menyampaikan/menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis; memastikan pemahaman; mendengarkan secara aktif dan efektif; mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
4. Orientasi pada hasil, mendorong pegawai untuk selalu mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi dalam menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil, untuk keberhasilan organisasi;
5. Pelayanan Publik, selalu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelembagaan/golongan/partai politik;
6. Pengembangan diri dan Orang lain, memfasilitasi pegawai untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri; menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran/bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya;
7. Mengelola Perubahan, mendorong pegawai untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif;
8. Pengambilan Keputusan, mendorong pegawai agar selalu membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta

bertanggung jawab atas keputusan yang diambil;

9. Perekat Bangsa, selalu mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat; mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri; menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia;

Adapun rencana yang akan dilakukan tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja antara lain:

1. Pendidikan dan Pelatihan: Pendidikan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan pemberian tugas belajar dan ijin belajar melalui pendidikan formal dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pelatihan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal.

Pelatihan klasikal dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses Pelatihan tatap muka di dalam kelas yang terdiri atas:

- Pelatihan struktural kepemimpinan;
- Pelatihan teknis;
- Pelatihan fungsional;
- Sosialisasi dan Kursus.

Pelatihan nonklasikal dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pelatihan diluar kelas yang terdiri atas:

- Pembimbingan (*Coaching*);
- Pendampingan (*Mentoring*);
- Pelatihan dengan media elektronik (*e-learning*);
- Pelatihan jarak jauh;
- Pelatihan alam terbuka (*outbond*).

2. Perencanaan dan Pengadaan Pegawai: Perencanaan melalui pengadaan CPNS setiap tahun sesuai arahan Kemenpan RB dan penerimaan mutasi masuk PNS instansi pemerintah lainnya serta melaksanakan open bidding demi mendapatkan kandidat-kandidat terbaik untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi.

3. Kerja sama SDM, Workshop dan Bimtek: Melakukan kerjasama baik dengan instansi pemerintah lainnya maupun non pemerintah. Kerjasama dengan Kementerian Keuangan yaitu seperti usulan permohonan lulusan PKN STAN setiap tahun untuk penempatan di Kemenko Marves, kerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan Prajab bagi CPNS setiap tahunnya, sedangkan kerja sama non pemerintah seperti dengan konsultan untuk melaksanakan assessment untuk seluruh PNS Kemenkomarves.

Workshop dan Bimtek termasuk pelatihan klasikal atau tatap muka di dalam kelas untuk seluruh pegawai Kemenkomarves untuk pengembangan kompetensi sehingga tercapai SDM yang kompeten melalui materi-materi yang bersifat penting demi kelangsungan berjalannya suatu organisasi.

Perbandingan capaian atas tahun 2020 dan tahun 2019 serta target tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 51. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja SS.11

No	Nama IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
16	Persentase SDM yang Kompeten	75	99	95



Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Setmenko Marves

Sasaran strategis 12 (SS.12) ini dijabarkan melalui 2 IKU yaitu sebagai berikut :

Tabel 52. Capaian Kinerja SS. 12

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
17	Nilai PMPRB Setmenko	8,49	70	90,70	129,57
18	Nilai SAKIP Setmenko	4,63	75	77,20	102,93
Nilai Capaian SS. 12					116,25

Nilai PMPRB Setmenko

Nilai tersebut diambil dari hasil penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assesement*) oleh Setmenko Marves. Penilaian tersebut dilakukan oleh Inspektorat terhadap implementasi RB Eselon I (Setemenko). Nilai PMPRB yang ditargetkan untuk dicapai adalah sebesar 70.

Anggaran yang digunakan untuk pencapaian indikator Nilai PMPRB Setmenko yaitu sebesar Rp. 734.061.000 (tujuh ratus tiga puluh empat juta enam puluh satu ribu rupiah) atau 99,81 dari target Rp. 735.446.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan demikian terdapat tingkat efisiensi 0,19 persen (Rp. 1.385.000,-), seperti terlihat di bawah ini:

Tabel 53. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 17

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%		
1	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	735.446.000	734.061.000	99,81	92,17	0,19

Walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,19 persen, namun seluruh kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian target IKU Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan-kegiatan tersebut terkait pelaksanaan pada 8 (delapan) Area Perubahan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Dalam mendukung implementasi RB pada area Manajemen Perubahan telah dilakukan hal-hal yaitu:

- Penyampaian bukti dukung renaksi RB menuju 80% secara berkala;
- Pengisian PMPRB *Online* tepat waktu;
- *Monev Quick Wins* secara berkala dan realisasi 100%;
- Pemberian *reward* kepada unit kerja Eselon I pengelolaan RB Terbaik;
- Penyusunan *Roadmap* RB Kemenko Marves 2020-2024;
- Monitoring dan evaluasi Agen Perubahan secara berkala yang output akhirnya yaitu pemberian *reward* kepada Agen Perubahan Teladan (Ditetapkan dengan penilaian 360°);
- Internalisasi Budaya Kerja, dan menjadi rekomendasi Kementerian PANRB kepada BKKBN terkait best practice sistem pengelolaan RB.

Strategi yang telah dilakukan diharapkan mampu memberikan perubahan yang signifikan pada komponen penilaian area manajemen perubahan yang memiliki bobot nilai 5,00. Pada tahun 2018 memperoleh 3,22 dan mengalami kenaikan 0,04 pada tahun 2019 yaitu 3,26. Optimisme yang dibangun mengingat pada tahun 2019 Kemenko Marves menjadi rekomendasi Kementerian PANRB kepada K/L untuk mempelajari sistem pengelolaan Reformasi Birokrasi.

2. Deregulasi Kebijakan

Target utama pada area perubahan Deregulasi Kebijakan yaitu:

- Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus;
- Membentuk sistem *tracking* penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, memperoleh JDIH Award ke-5 Nasional;
- Membangun *Digital Signature* bekerjasama dengan Badan Siber Sandi Negara, dan membangun Forum Koordinasi Hukum 7 K/L di bawah Kemenko Marves.

Inovasi dan pemenuhan rekomendasi yang telah dilakukan di area penataan perundang-undangan diharapkan mampu mendongkrak nilai yang diperoleh pada Tahun 2019 yaitu 3,95 dari bobot nilai 5,00. Area perubahan ini telah memperoleh prestasi luar biasa yaitu mendapatkan penghargaan anggota JDIH peringkat 5 terbaik nasional Tahun 2020.

3. Penataan Organisasi

Dalam mendukung Area perubahan Penataan Organisasi telah dilakukan Prioritas Nasional yaitu:

- Penyederhanaan Birokrasi (Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional);
- Kemenko Marves melalui 2 hal besar yaitu perubahan organisasi dan tata kerja 2 (dua) kali dalam setahun dengan output 2 (dua) Dokumen Permenko (Permenko 2 Tahun 2020 dan Permenko 10 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi);
- Evaluasi kelembagaan Kemenko Marves mendapatkan nilai 77,27 termasuk peringkat komposit 4 (P4);
- Membangun Sistem Ortala (Penyusunan ANJAB dan ABK berbasis sistem dan integrasi data dengan sistem HR Kepegawaian);
- Penyusunan Dokumen Anjab dan ABK, Kamus kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).

Area perubahan organisasi memiliki tugas berat tahun 2020, yaitu mendukung pelaksanaan prioritas nasional Penyederhanaan Birokrasi. Kemenko Marves telah melakukan hal tersebut tepat waktu yaitu mengusulkan sebelum 31 Juni 2020. Harapannya nilai yang diperoleh tahun ini bisa naik signifikan dari nilai tahun 2019 yaitu 3,96 dari bobot 6,00.

4. Tatalaksana

Area perubahan Tatalaksana telah melakukan berbagai inovasi dalam mendukung terlaksananya tugas dengan baik yaitu:

- Sistem Informasi SOP yang memudahkan dalam memonitor proses penyusunan SOP;
- Pembangunan Infrastruktur Manajemen;
- Integrasi Sistem (*Single Sign On*) dalam rangka mendukung pelaksanaan SPBE yang memperoleh indeks 2,52;
- Survei kualitas pelayanan SOP secara berkala;
- Penyusunan Peta Proses Bisnis yang telah dituangkan dalam SOP;
- Implementasi *E-Gov* Kemenko Marves melalui *Marves Core* yang mengintegrasikan beberapa Sistem yaitu MARVES HR, MARVES LETTER, MARVES ROOM, MARVES VEHICLE, dan Integrasi Sistem HR dan Ortala.

Area Perubahan Tata laksana melakukan perubahan yang sangat besar pada sub komponen Implementasi *E-Government*, berbagai sistem yang telah dibuat sudah diintegrasikan. Bobot nilai 5,00 telah memperoleh Tahun 2019 2,73 lebih dari setengah bobot nilai. Harapannya tahun 2020 bisa memperoleh lebih tinggi lagi.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM yang telah dilakukan yaitu:

- Menyusun ANJAB dan ABK;
- Proyeksi kebutuhan pegawai jangka waktu 5 Tahun;
- Evaluasi jabatan;
- Pemberian *reward* dan *punishment* kepada pegawai, penetapan kinerja individu;
- Pelaksanaan penerimaan CPNS;
- Seleksi terbuka JPT secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN serta di *publish* melalui kanal sosial media Kemenko Marves;

- Pembangunan Sistem HR untuk menghimpun data pegawai;
- Memperoleh Indeks Merit Sistem sebesar 184,5 masuk kategori 2, Indeks Profesionalitas ASN sebesar 80 dan menyusun manajemen talent pool, dan reviu Kamus Kompetensi teknis dan Standar Kompetensi Jabatan oleh Kementerian PANRB.

Area Perubahan Sistem Manajemen SDM merupakan area perubahan paling besar bobot nilainya yaitu 15,00. Pada Tahun 2019 nilainya yaitu 11,90 termasuk kategori baik. Harapannya Tahun 2020 bisa naik signifikan dengan hal-hal yang telah dilakukan.

6. Penguatan Akuntabilitas

Dalam mendukung area perubahan penguatan akuntabilitas, Kemenko Marves berkomitmen untuk:

- Melibatkan pimpinan dalam berbagai kegiatan penyusunan dan monev kinerja;
- Membangun sistem informasi kinerja maritim berbasis *balance score card*;
- Secara berkala melakukan peningkatan kapasitas pegawai dalam menangani akuntabilitas kinerja; dan
- Melakukan benchmarking kepada K/L dan Pemerintah Daerah yang memiliki pengelolaan kinerja berpredikat AA sesuai rekomendasi KemenPAN & RB.

Area Penguatan Akuntabilitas memiliki bobot 6,00, namun mempunyai pengaruh besar terhadap akuntabilitas Kementerian. Penilaian khusus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki bobot tersendiri. Kenaikan 2 (dua) tahun terakhir tidak begitu signifikan yaitu pada tahun 2018 memperoleh nilai 4,38 dan tahun 2019 4,54. Berbagai upaya benchmarking dengan K/L dan Pemerintah Daerah yang memiliki nilai SAKIP baik, diharapkan mampu mendongkrak nilai area perubahan penguatan akuntabilitas pada tahun 2020.

7. Penguatan Pengawasan

Pada area perubahan Penguatan Pengawasan yaitu sebagai berikut:

- Dibangun unit pengendali gratifikasi, sosialisasi terkait gratifikasi dan dilakukan monev secara berkala;
- Membangun sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan Sistem SP4N-LAPOR;
- Komitmen melaporkan LHKPN dan LHKASN 100%, membangun Tim Peningkatan Maturitas SPIP;
- Bimtek dan monev SPIP secara berkala, persentase TLHP BPK Kemenko Marves tahun 2020 sangat baik mencapai 98,3%; dan
- Pembangunan Unit ZI berpredikat WBK/WBBM yang pada tahun 2020 Kemenko Marves berhasil 1 unit kerja ZI yang berpredikat WBK.

Area perubahan Pengawasan menjadi area perubahan kedua tertinggi bobot nilai yaitu 12,00. Area perubahan ini menjadi peran utama dalam mendukung upaya pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Area perubahan ini masih memerlukan perhatian khusus, mengingat bobot nilai yang masih jauh dari yang diharapkan. Pada tahun 2018 memperoleh nilai 5,19 dan pada Tahun 2019 yaitu 5,35. Nilai tersebut masih sangat rendah bahkan belum setengah dari bobot nilai. Harapannya tahun 2020 dengan upaya yang sudah dilakukan mampu memperoleh kenaikan nilai yang signifikan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka mendukung area perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dilakukan upaya-upaya yaitu:

- Menyusun standar pelayanan Kemenko Marves, setiap unit kerja menyusun membuat maklumat pelayanan yang disampaikan pada website Maritim, sistem pengaduan dan ditindaklanjuti serta di monev setiap triwulan;
- Membangun sistem kepuasan layanan (Kepuasan layanan indeks 3,75 dari 5 kategori Puas, dan Persepsi Korupsi dengan Indeks 3,90);
- Pembangunan ruang PPID Kemenko Marves, serta penggunaan kanal sosial media secara aktif dan update informasi terbaru, khusus dimasa pandemi Covid-19 Kemenko Marves menerapkan tata pengelolaan pemerintahan new normal dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan seperti (*scanner* suhu tubuh, *hand sanitizer*, masker, penerapan jaga jarak di *lift* dan tombol tanpa sentuh, kebijakan WFH dan WFO

bagi pegawai).

Kemenko Marves juga memperoleh penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Kementerian Paling Informatif Terbaik tahun 2020 yang diserahkan oleh Wakil Presiden dan survei pelayanan publik dengan indeks 3,52 dalam skala 4. Untuk mendukung tersiarnya informasi Kemenko Marves lebih luas telah disusun juga majalah Marves, buku Marves dalam berita dan Marves dalam grafis, produksi video dokumenter Marves, pembangunan konten, dan *workshop* peningkatan kapasitas pegawai di bidang videografi dan membangun konten.

Area perubahan kualitas pelayanan publik menjadi andalan Kemenko Marves sebagai Kementerian Koordinator yang mengkoordinir 7 K/L di bawahnya. Meski memiliki bobot 6,00, tapi memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan kepada stakeholder-stakeholder terkait. Namun perolehan nilai masih jauh dari harapan yaitu pada tahun 2018 memperoleh nilai 2,49 dan pada tahun 2019 nilainya 2,91 hanya naik sedikit yaitu 0,42. Harapannya Tahun 2020 nilai nya bisa lebih dari setengah bobot nilai.

Perbandingan capaian atas IKU 17 tahun 2020 dan 2019 serta target tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 54. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 17

No	Nama IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
17	Nilai PMPRB Setmenko	75	90,70	87

Nilai SAKIP Setmenko

Nilai evaluasi tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Setmenko Marves. Nilai SAKIP didapatkan melalui Nilai hasil evaluasi internal APIP terhadap pelaksanaan SAKIP di lingkup Setmenko.

Anggaran yang digunakan untuk mencapai target indikator Nilai SAKIP Setmenko sebesar Rp. 1,597,862,157 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) atau 92,53 persen dari target Rp. 1,726,843,000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 7,47 persen (Rp. 128.980.843), seperti pada Tabel 57 berikut ini:

Tabel 55. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 17

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Layanan Akuntabilitas Kinerja	1,726,843,000	1,597,862,157	92.53	7,47

Walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,47 persen, namun seluruh kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian target IKU Nilai SAKIP Setmenko telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

1. Pada penyusunan dokumen renaksi, pembuatan pohon kinerja setiap unit dilakukan pendampingan oleh tim monitoring dan evaluasi kinerja.
2. Meningkatkan target kinerja tahunan pada beberapa IKU seperti:
 - Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menargetkan capaian pada 2020 sebesar 3 dibandingkan tahun 2019 (target SPBE: 2)
 - Target tahunan nilai RB yang meningkat dari 70 menjadi 75 pada dokumen PK Setmenko
 - Meningkatnya target Persentase Pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan tahun (2019: 50%) sedangkan pada 2020 dengan adanya IKU Persentase SDM yang Kompeten (Target tahun 2020: 75%)
 - Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan dan harapan kinerja di Setmenko Marves semakin meningkat.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk penguatan SAKIP dan meningkatkan

capaian kinerja atas indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan beberapa juknis sebagai turunan Permenko Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemenko Marves;
2. Melakukan integrasi aplikasi terkait SAKIP;
3. Terus melakukan peningkatan kapasitas SDM SAKIP;
4. Mengintegrasikan beberapa proses SAKIP untuk mendukung penghitungan kinerja individu melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perbandingan capaian tahun 2020 dan 2019 serta target 2024 atas IKU 18 sebagai berikut:

Tabel 56. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja IKU 18

No	IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
18	Nilai SAKIP Setmenko	70	77,20	80





Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Setmenko Marves

Sasaran strategis 13 (SS.13) ini dijabarkan melalui 1 IKU yaitu sebagai berikut :

Tabel 57. Capaian Kinerja SS.13

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
19	Nilai IKPA Setmenko	4,63	95	93,79	98,96
Nilai Capaian SS. 13		4,63	95	93,79	98,96

Berdasarkan hasil evaluasi prestasi kinerja pelaksanaan anggaran, atau dikenal dengan evaluasi Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) maka Kemenko Marves mengalami penurunan. Pada tahun 2019 kemenko Marves mencapai skor IKPA 94.09. Sedangkan untuk tahun anggaran 2020 nilai IKPA yang dicapai adalah sebesar 93.79, dari yang ditargetkan sebesar 95. Artinya untuk tahun 2020, kinerja pengelolaan anggaran belum memenuhi target yang telah ditetapkan, selain hal ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 sehingga penyerapan dan penggunaan anggaran agak terhambat, namun beberapa kegiatan telah dilakukan untuk pencapaian target IKPA.

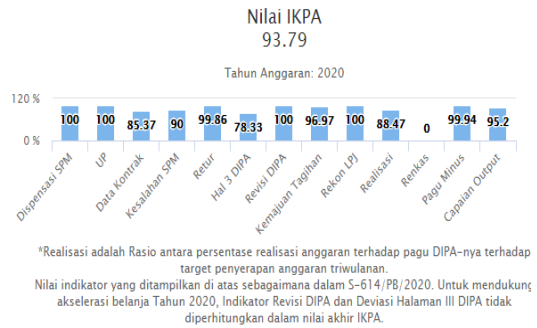
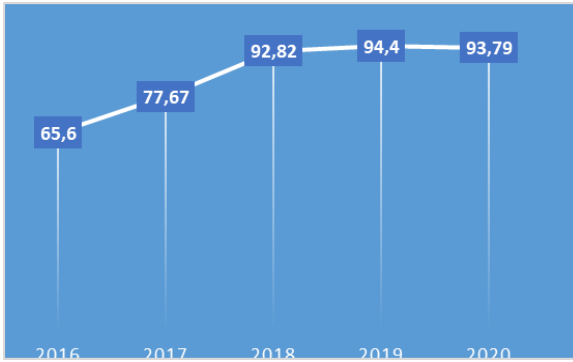
IKPA merupakan alat ukur untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA dinilai oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan mendasarkan pada 13 indikator, yaitu: Revisi DIPA, Deviasi Hal. III DIPA, Pagu Minus, Data Kontrak, Pengelolaan UP, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Retur SP2D, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, konfirmasi capaian output, Kesalahan SPM dan Renkas. Khusus untuk tahun 2020 terkait dengan kondisi Covid-19, untuk mendukung akselerasi belanja Tahun 2020, Indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA tidak diperhitungkan dalam nilai akhir IKPA.

Untuk tahun anggaran 2020, nilai IKPA yang ditargetkan adalah sebesar 95. Per 31 Desember 2020, nilai IKPA yang dicapai adalah sebesar 93.79. Artinya untuk tahun 2020, kinerja pengelolaan anggaran belum melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 58. Rincian Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2019 dan 2020

No	Indikator	Nilai IKPA	
		2019	2020
1	Revisi DIPA	5,00	0
2	Halaman III DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)	2,69	0
3	Pagu Minus	4,00	5,00
4	Data Kontrak	12,75	12,81
5	Pengelolaan UP dan TUP	10,00	8,00
6	LPJ Bendahara	5,00	5,00
7	Dispensasi SPM	4,00	5,00
8	Penyerapan Anggaran	-	13,37
9	Penyelesaian Tagihan	14,56	11,64
10	Konfirmasi Capaian Output	20,00	9,52
11	Retur SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)	5,99	4,99
12	Renkas (rencana Kas/Penarikan Dana)	5,00	0,00
13	Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM)	5,40	4,50
Total		94,40	93,79

Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	Nilai	100.00	78.33	99.94	85.37	100.00	100.00	100.00	88.47	96.97	95.20	99.86	0.00	90.00	79.72	85%	93.79
	Bobot	0	0	5	15	8	5	5	15	12	10	5	0	5			
	Nilai Akhir	0.00	0.00	5.00	12.81	8.00	5.00	5.00	13.27	11.64	9.52	4.99	0.00	4.50			
	Nilai Aspek	99.94			96.34				95.13				90.00				



Tabel 60. Rincian Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2019 dan 2020

No	Indikator	Nilai IKPA	
		2019	2020
1	Revisi DIPA	5,00	0
2	Halaman III DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)	2,69	0
3	Pagu Minus	4,00	5,00
4	Data Kontrak	12,75	12,81
5	Pengelolaan UP dan TUP	10,00	8,00
6	LPJ Bendahara	5,00	5,00
7	Dispensasi SPM	4,00	5,00
8	Penyerapan Anggaran	-	13,37
9	Penyelesaian Tagihan	14,56	11,64
10	Konfirmasi Capaian Output	20,00	9,52
11	Retur SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)	5,99	4,99
12	Renkas (rencana Kas/Penarikan Dana)	5,00	0,00
13	Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM)	5,40	4,50
Total		94,40	93,79

Sumber: Aplikasi SMART Ditjen Anggaran Kemenkeu

Tabel 61. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja SS.13

No	Nama IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
19	Nilai IKPA Setmenko	94,40	93,79	98

Anggaran yang digunakan untuk pencapaian IKU ini adalah sebesar Rp. 3,069,050,677 (tiga milyar enam puluh sembilan juta enam lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 95,35 persen dari target Rp. 3,218,705,000 (tiga milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah). Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 4,35 persen (Rp. 149.654.323,-), seperti terlihat pada Tabel 64 berikut:

Tabel 62. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran IKU 19

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Rp	%	
1	Layanan Manajemen Keuangan	3,218,705,000	3,069,050,677	95.35	4,35

Walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,35 persen, namun seluruh kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian target IKU Nilai IKPA telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan revisi DIPA secara selektif.
2. Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin
3. Melaksanakan kontrol data kontrak pada unit kerja.
4. Ketepatan waktu dalam *revolving UP*. *Revolving* diupayakan minimal satu kali setiap bulan. Untuk TUP strateginya adalah dengan mengajukan permintaan di bawah 1 miliar sehingga pertanggungjawaban lebih cepat selesai.
5. Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan.
6. Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari retur SP2D.
7. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan).
8. Pembentukan Tim pemantau IKPA yang secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulan.

Beberapa hal yang berperan dalam keberhasilan pencapaian target nilai IKPA yang baik adalah:

1. Adanya peningkatan kedisiplinan dan ketertiban dalam pengelolaan anggaran;
2. Peningkatan kemampuan pelaksanaan anggaran dari masing-masing unit kerja di lingkup Kemenko Kemaritiman;
3. Adanya dukungan dan komitmen dari semua level pimpinan;
4. Penyusun jumlah pengajuan penggunaan anggaran yang dibutuhkan secara proporsional sesuai kemampuan penggunaannya dan akuntabel.

Selain itu beberapa program yang turut mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian target kinerja ini:

- Program meningkatkan kapasitas pengelola keuangan melalui kegiatan berupa sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat;
- Program konsultasi dan bimbingan dari Kementerian Keuangan selaku Lembaga yang berwenang melakukan penilaian terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu atau sebagai tools dalam penyelesaian pekerjaan.

Guna meningkatkan nilai IKPA pada tahun 2021, selain mempertahankan pencapaian yang ada dengan 8 strategi sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka perlu dilaksanakan strategi untuk meningkatkan nilai indikator Halaman III DIPA. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan revisi Halaman III DIPA setiap triwulan bersamaan dengan pelaksanaan revisi DIPA. Revisi tersebut harus mencerminkan pola penyerapan yang baik dan diikuti komitmen para pengelola keuangan untuk mengikuti dan melaksanakan rencana tersebut, melaksanakan beberapa kali rapat koordinasi dengan Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kemenkeu dengan melibatkan seluruh unit kerja lingkup Kemenko Marves guna sosialisasi aplikasi, serta melakukan input data realisasi kinerja ke Aplikasi SMART DJA secara reguler.



3.2 Capaian Realisasi Keuangan

Perubahan nomenklatur organisasi menjadi Kemenko Marves diikuti dengan perubahan struktur dan perluasan fungsi Kementerian Koordinator. Hal ini selanjutnya mengakibatkan terjadinya serangkaian revisi DIPA untuk mengakomodir perubahan struktur dengan melakukan redistribusi pagu untuk unit kerja Eselon I yang baru terbentuk. Namun, khusus untuk Setmenko diputuskan untuk tidak mengubah struktur anggaran walaupun terjadi penambahan unit kerja Eselon II yakni Biro Komunikasi. Pada tahun 2020, anggaran Biro Komunikasi masih melekat pada Biro Umum dan Biro Perencanaan yang pada struktur organisasi sebelumnya melaksanakan tugas dan fungsi Biro Komunikasi.

Meskipun sempat mengalami stagnasi penyerapan anggaran akibat pandemi Covid-19, realisasi anggaran Setmenko tahun 2020 per 31 Desember 2020 menunjukkan hasil kinerja yang baik. Pada tahun 2020, Setmenko memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp 188.271.644.000,- atau sebesar 72 % dari total pagu Kemenko. Dari alokasi pagu tersebut, anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp 175.678.682.126 atau sebesar 93,31 %. Tabel 63 berikut menyajikan secara rinci data pagu dan realisasi anggaran Setmenko tahun 2020 per jenis belanja.

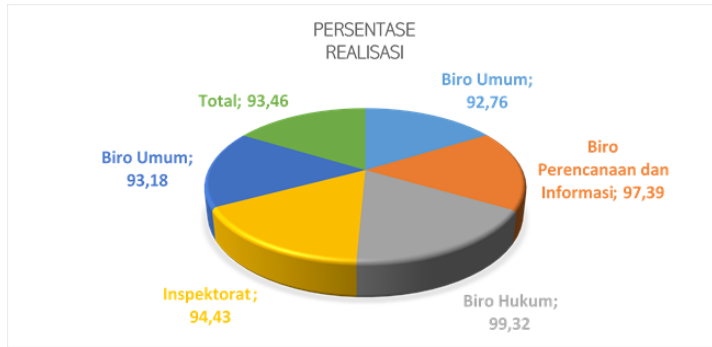
Tabel 63. Pagu dan Realisasi Anggaran Setmenko Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	57.914.167.000	50.866.358.648	87,83
2.	Belanja Barang	104.863.189.000	100.602.146.657	95,94
3.	Belanja Modal	25.494.288.000	24.210.176.821	94,96
	Jumlah Belanja	188.271.644.000	175.678.682.126	93,31

Dari tabel di atas terlihat bahwa kinerja penyerapan anggaran per jenis belanja kecuali belanja pegawai berada pada level yang sangat baik yakni pada kisaran 95 %. Kinerja penyerapan belanja pegawai yang di bawah 90 % disebabkan beberapa hal. Pertama, CPNS formasi tahun 2019 yang diperkirakan akan mulai bekerja pada awal tahun 2020 ternyata proses penerimaannya baru selesai di bulan Desember 2020. Kedua, jabatan struktural pada struktur organisasi Kemenko yang baru belum seluruhnya diisi. Ketiga, masih banyak PNS dengan status dipekerjakan yang belum mutasi penuh ke Kemenko sehingga gajinya masih dibayarkan di instansi asal. Ketiga hal ini mengakibatkan anggaran gaji dan tunjangan yang dialokasikan menjadi berlebih sekitar 7 miliar rupiah. Adapun realisasi anggaran berdasarkan kegiatan seperti terlihat pada Tabel 64 di bawah ini:

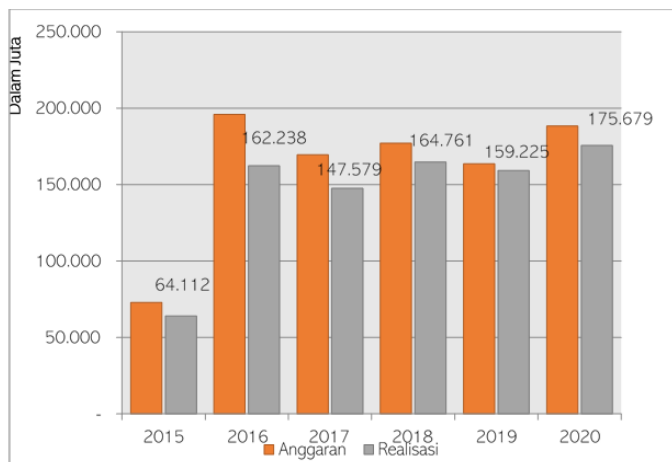
Tabel 64. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Setmenko Tahun 2020

No.	Kode Kegiatan	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Unit Kerja
1	5601	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	159.352.927.000	147.819.626.938	Biro Umum
2	5602	Penyusunan Rencana Program Anggaran Kerja Sama Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	17.954.467.000	17.485.010.725	Biro Perencanaan dan Informasi
3	5603	Pengelolaan Informasi Persidangan Kehumasan Administrasi Hukum dan Organisasi	6.430.796.000	6.386.820.734	Biro Hukum
4	5604	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman	3.290.000.000	3.106.583.535	Inspektorat
5	5748	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional	1.243.454.000	1.158.698.303	Biro Umum
TOTAL			188.271.644.000	175.956.740.235	



Grafik 1. Realisasi Unit Kerja Lingkup Setmenko

Dari tabel dan gambar diagram di atas terlihat realisasi tertinggi pada Biro Hukum mencapai 99,32 %, dengan jumlah pagu anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.430.796.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.386.820.734,- dan unit kerja lingkup Setmenko dengan penyerapan terendah yaitu Biro Umum dengan realisasi 92,76% dengan pagu Rp. 159.352.927.000,- dengan realisasi Rp. 147.819.626.938,-.



Grafik 1. Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator Periode Tahun 2015 s.d. 2020

Capaian realisasi anggaran jika dianalisa dengan menggunakan data periode tahun 2015 s.d. 2020 maka capaian kinerja penyerapan anggaran tahun 2020 berada di atas rata-rata tahunan yang sebesar 90, 22 %. Hal ini berarti secara konsisten penyerapan anggaran di Setmenko telah berada pada level kinerja baik yakni selalu di atas 90 %. Pada periode tahun 2015 s.d. 2020, Setmenko rata-rata menerima alokasi pagu anggaran sebesar 161 miliar rupiah dengan rata-rata realisasi sebesar 145 miliar rupiah. Perkembangan pagu anggaran dan penyerapan anggaran disajikan pada gambar berikut:



3.3 Capaian Kinerja Strategis

Selain capaian kinerja yang dihasilkan sesuai dengan target dalam Renstra/PK, sepanjang tahun 2020 Setmenko Marves juga telah berhasil menghasilkan beberapa capaian strategis, prestasi dan inovasi, diantaranya yaitu:

Prestasi dan Inovasi Kemenko Marves Tahun 2020

A. Prestasi

Sepanjang tahun 2020 Setmenko Marves mendapatkan beberapa penghargaan terkait capaian yang diraih oleh unit kerja Kemenko Marves, adapun daftar penghargaan sebagai berikut:

1. JDIH Award Tahun 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Peringkat V Terbaik Tk. Kementerian)



2. Penghargaan dari KIP (Komisi Informasi Publik) kepada PPID Kemenko Marves dalam memberikan layanan dokumentasi dan informasi berupa Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif dengan nilai 92,44.



3. Peringkat Kedua dalam IKPA Award 2019



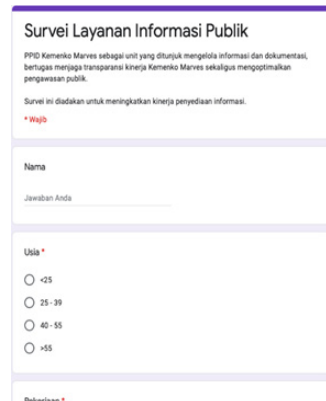
4. Penerimaan LHP dari BPK dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas LK Tahun 2019.



B. Inovasi Kemenko Marves

1. Peningkatan pelayanan dengan melaksanakan Survey Kepuasan Layanan Publik

Ada 6 kategori dalam survey terhadap layanan informasi publik ini yaitu: Prosedur; Kecepatan Pelayanan; Evaluasi Kinerja; Kompetensi Pegawai; Perilaku Pegawai; Peran, Tugas, dan Fungsi; Strategi Informasi dan Komunikasi. Hasil survei persepsi terhadap pelayanan publik yang dilakukan di lingkup Kemenko Marves menunjukkan indeks 3,52 dalam skala 4 atau sebesar 88%. Hasil survei tersebut menunjukkan telah melebihi dari target yang ditetapkan di dalam PK sebesar 66,67%.

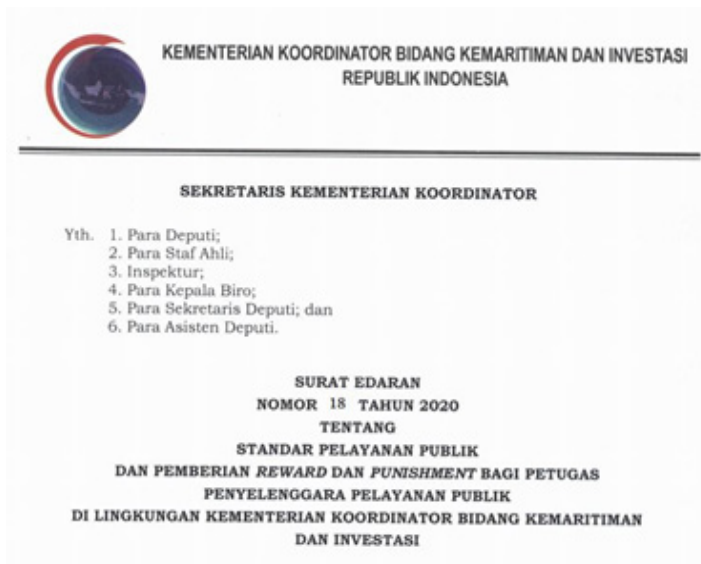


2. Revitalisasi layanan PPID Kemenko Marves pada tahun 2020, diantaranya: Revitalisasi website PPID Kemenko Marves pada laman <https://e-ppid.maritim.go.id>. Perbaikan tidak hanya pada jaringan, namun terhadap kualitas dan kelengkapan informasi dan dokumen yang disediakan.



PPID KemenkoMarves memiliki ruangan sendiri, sehingga masyarakat umum memiliki pilihan untuk menerima layanan, publik bisa datang langsung untuk meminta layanan dokumentasi maupun informasi terkait dengan Kemenko Marves.

3. Penerbitan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik dan Pemberian reward dan punishment bagi Petugas Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.



4. Pengelolaan Pengaduan, publik dapat melakukan pengaduan langsung melalui akses Lapo! Yang terdapat pada website maritim.go.id. Layanan ini terkoneksi dengan semua K/L sehingga penanganan pengaduan lebih terintegrasi. Pengaduan publik terkait internal Kemenko Marves difasilitasi dengan fasilitas Pesan. Pesan dapat diakses melalui website maritim.go.id. Sampai dengan November 2020, PESAN telah melayani 150 pengaduan dari masyarakat. Tindak lanjut dan evaluasi pengaduan terdapat dalam Rekap APLIKASI PESAN dan laporan Telaah Kasus Hukum per-triwulan (REFORM).



5. Temu Media, sebelum dan selama menghadapi masa pandemi Covid-19, Kemenko Marves terus meningkatkan kinerja dan menginformasikannya ke media baik cetak maupun elektronik, dengan capaian selama tahun 2020 yaitu:

- a) Sebelum pandemi, konferensi pers atau coffee morning secara tatap muka telah diadakan 2 kali, Menko Marves juga menghadiri talkshow di beberapa stasiun Televisi Swasta dan TVRI.
- b) Selama masa pandemi, temu media dilakukan secara virtual. Pada tahun 2020, telah dilakukan total 28 Konferensi Pers Virtual. Selain konferensi pers, Menko Marves menjawab langsung pertanyaan media dan masyarakat umum melalui program Temu Tanya Marves (TTM).



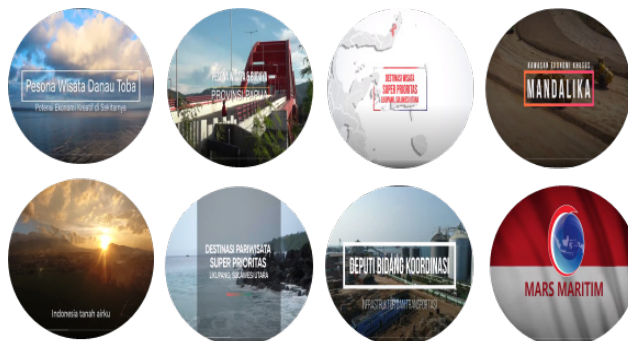


6. Penyebaran informasi lainnya

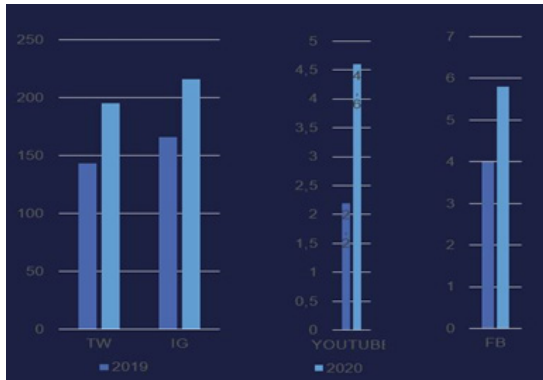
Selain dengan media cetak dan elektronik dari eksternal Kemenko Marves, juga dengan penerbitan majalah dan buku. Sepanjang tahun 2020, telah diproduksi 4 majalah Marves. Konten majalah fokus pada program kerja dan kegiatan Kemenko Marves dan Telah diterbitkan 8 e-book, yaitu “Marves Dalam Berita” dan “Marves Dalam Grafis”.



7. Produksi Video Dokumenter: 10 Destinasi unik di DPSP Likupang (2 video); Mars maritim (1 video); Lagu Indonesia Raya (1 video); Pembangunan Zona Integritas Deputi (4 video); Surga wisata dan budaya Papua (2 video); DPSP Danau Toba (2 video); DPSP Labuan Bajo (2 video); Destinasi Wisata Malang (2 video); Testimoni Penyintas Covid-19 (1 video); Petualangan di Goa Sumitro (1 video); Profil dan Capaian Kinerja Kemenko Marves 2014 – 2020 (2 video).



8. Semua kanal media sosial Kemenko Marves mengalami peningkatan pengikut, peningkatan signifikan ditunjukkan pada kanal youtube, hal ini dipengaruhi dengan semakin tingginya pelaksanaan webinar. Sepanjang tahun 2020, telah dibangun 777 Konten Media Sosial.



9. *Public Service Announcement*

Artikel Kerja Sama RI-UEA	Koran Sindo – 29 Januari 2020
Artikel Papua Barat	Warta Ekonomi – Maret 2020
Artikel Data Kepulauan	Suara Pembaharuan 9 Maret 2020
Artikel Data Kepulauan	Suara Pembaharuan 9 Maret 2020
Ruang Merdeka Live Bersama SAM	Merdeka.com – 11 Juni 2020
Artikel Persiapan MotoGP Mandalika	Rakyat Merdeka – 28 Oktober 2020
Ringkasan Laporan Keuangan 2019	Media Indonesia – 30 Oktober 2020
Artikel PEN Terumbu Karang	Investor Daily – 30 Oktober 2020
Artikel Food Estate	Rakyat Merdeka – 30 Oktober 2020
Advetorial Likupang	TVRI – 21 Desember 2020
Advetorial	Metro TV dan Kompas.com – Desember 2020



10. Perayaan Hari Maritim Nasional 2020:

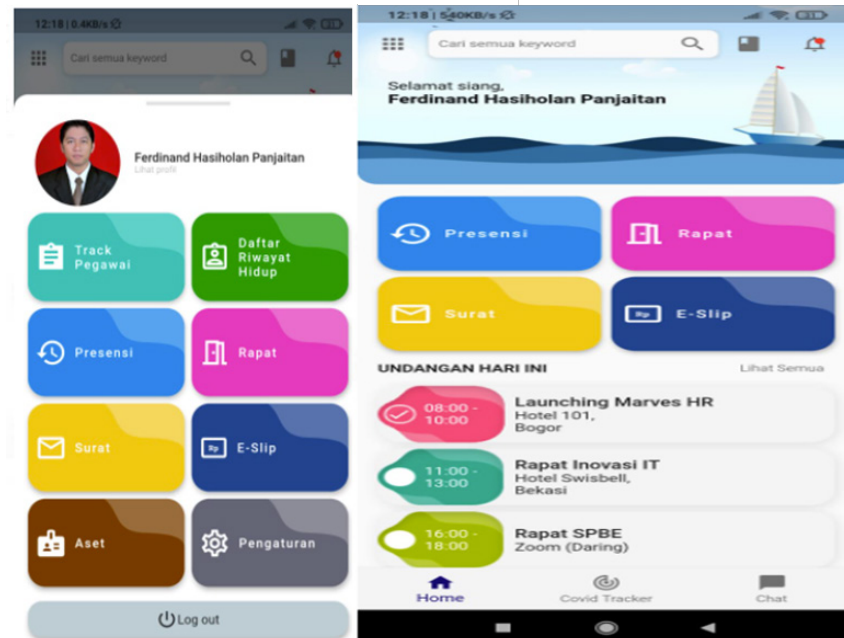
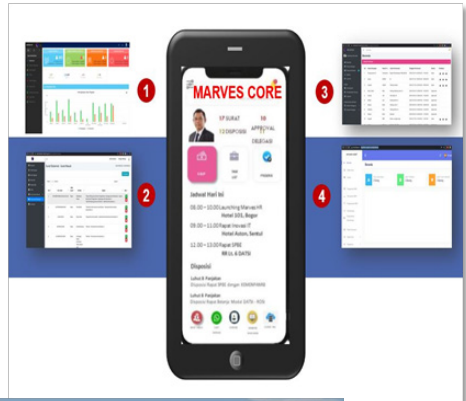
Peringatan Hari Maritim Nasional 2020 dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom dan disiarkan secara langsung pada kanal youtube Kemenko Marves. Pemateri pada pelaksanaan yaitu Prof. Dr. Indroyono Soesilo (Menko Maritim 2014-2015), Prof. Dr. Rokhmin Dahuri (Menteri KKP 2001-2004), Sesmenko Marves, Kepala Biro Komunikasi Marves, serta para budayawan.



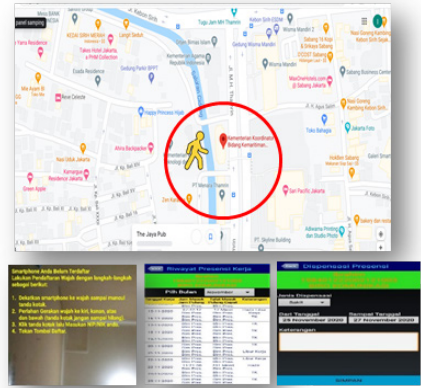
Hari Maritim Nasional 2020 juga dirayakan pada media sosial. Humas telah melakukan koordinasi dengan K/L untuk menyebarkan narasi tunggal pada kanal resmi masing-masing K/L terkait Hari Maritim Nasional 2020.

11. Integrasi - Level SSO

- Marves HR: Aplikasi kepegawaian tersedia *web service*, SSO-100%,
- Marves *Letter*: Aplikasi persuratan penyiapan *web service* SSO-25%,
- Marves *Room*: Aplikasi ruang rapat penyiapan *web service* SSO-0%
- Marves *Vehicle*: Aplikasi kendaraan penyiapan *web service* SSO-0%



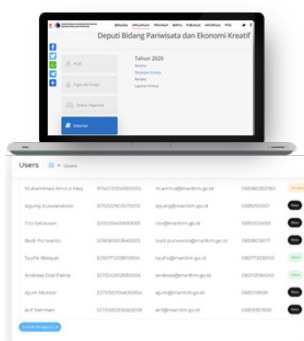
12. E-Presensi, pegawai dapat melakukan presensi dengan deteksi melalui wajah, deteksi lokasi radius lokasi dari titik kordinat Marves Radius 100 Meter: pegawai dapat melakukan presensi. Melalui playstore: PM Marves dengan fitur: Presensi harian (masuk-pulang); Dispensasi presensi (rapat, WFH, Cuti dst); Rekapitulasi presensi bulanan.



13. Implementasi Sertifikat Elektronik: PKS antara Kemenko Marves dan BSRE BSSN tentang pemanfaatan sertifikat elektronik, proses enroll untuk penerbitan sertifikat elektronik bagi Eselon I dan II Kemenko Marves. Dengan tindaklanjut: Penunjukan Tim Verifikator Penerbitan Sertifikat Elektronik Lingkup Kemenko Marves; Proses enroll untuk Lingkup Setmenko; Proses enroll untuk Lingkup Kedeputusan Kemenko Marves serta Proses enroll ditargetkan dapat selesai pada April 2021.



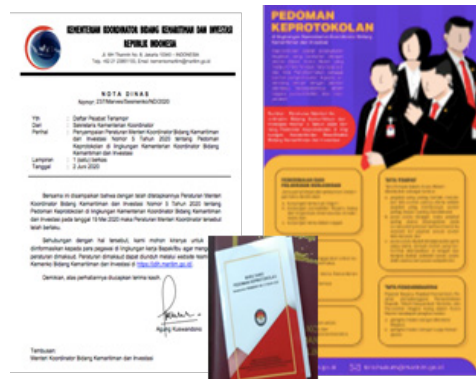
14. Jumlah aplikasi yang ada di Kemenko Marves yaitu 25 aplikasi, dengan rincian 20 aplikasi aktif dan 5 aplikasi non aktif (host diluar Kemenko Marves). Saat ini proses integrasi masih berjalan, aplikasi dengan host di luar Kemenko Marves secara bertahap akan dialihkan ke Kemenko Marves. Tahun 2021



No	Nama	Host	Status
1	e-boarding	Luar	Aktif
2	standan aisk	Luar	Aktif
3	sido / simpig	Luar	Non Aktif
4	simasomar	Luar	Aktif
5	stranga	Luar	Aktif
6	cloud drive	Maritim	Aktif
7	e-laporan	Maritim	Aktif
8	email maritim	Maritim	Aktif
9	e-ib maritim	Maritim	Aktif
10	gis maritim go id	Maritim	Aktif
11	jam maritim go id	Maritim	Aktif
12	jam Maritim	Maritim	Aktif
13	maritimeam	Maritim	Aktif
14	ppid	Maritim	Aktif
15	salugrupu	Maritim	Aktif
16	siakp	Maritim	Aktif
17	simonak	Maritim	Aktif
18	sipianet	Maritim	Aktif
19	sistem informasi kinerja maritim (SISKAK)	Maritim	Aktif
20	website DA	Maritim	Aktif
21	website maritim	Maritim	Aktif
22	simasmarves	Luar	Non Aktif
23	infanet	Luar	Non Aktif
24	sepa	Luar	Non Aktif
25	simona	Luar	Non Aktif

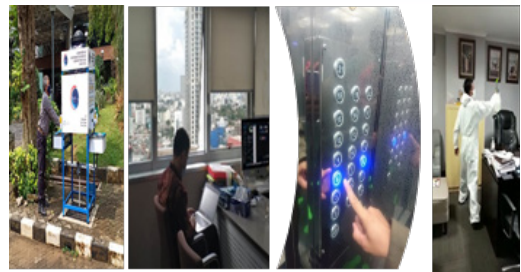
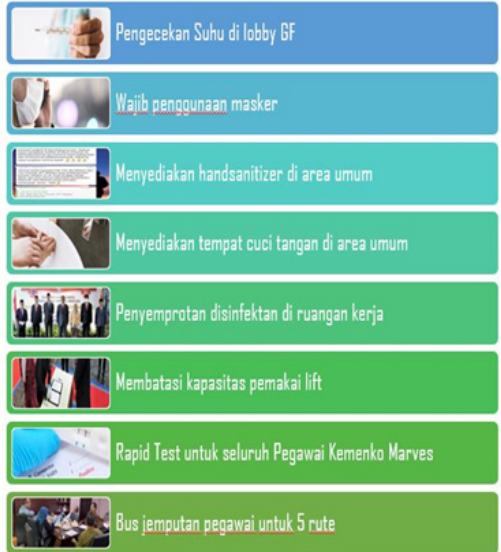
aplikasi yang berada di luar Kemenko Marves akan terintegrasi dan menggunakan domain maritim.go.id. Capaian kinerja tahun 2020 dioperasikannya aplikasi pada data center Kemenko Marves dan tersedianya 4 (empat) informasi dasar di website marves keempat jenis dokumen yaitu: Renstra, Renaksi, PK dan Lakip.

15. Pedoman Keprotokolan telah diundangkan, Pedoman Keprotokolan disahkan pada bulan Mei 2020 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi menandatangani Permenko Marves Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi. Pedoman ini memuat lampiran sebanyak 41 halaman yang telah disosialisasikan melalui berbagai channel komunikasi (nota dinas, website JDIH, videografis dan infografis, serta buku saku), dijadikan acuan pelayanan dan penyelenggaraan keprotokolan di Kemenko Marves.



16. Media Internal Marves: Marves TV dan Studio Marves, *Podcast Marves*

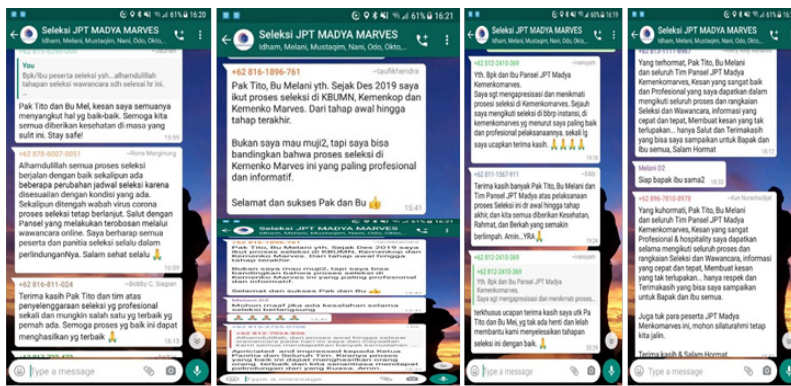
17. Penanganan Covid-19 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PermenPAN & RB Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah di Wilayah Jabodetabek Dalam Tatanan Normal Baru, inovasi yang dilakukan Kemenko Marves yaitu: mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, beberapa protokol Kesehatan yang sudah dilakukan oleh Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan adalah sebagai berikut : 1) Pengecekan Suhu di lobby GF; 2) Wajib penggunaan masker; 3) Menyediakan *handsanitizer* di area umum; 4) Menyediakan tempat cuci tangan di area umum; 5) Penyemprotan disinfektan di ruangan kerja; 6) Membatasi kapasitas pemakai lift; 7) *Rapid test* untuk seluruh Pegawai Kemenko Marves; 8) Bus jemputan pegawai untuk 5 rute; 9) Penyemprotan disinfektan pada ruang kerja; 10) Pemasangan alat *touchless button* pada *lift* pegawai; 11) Covid tracker (*tools* pemantauan perkembangan Covid di lingkungan Kemenko Marves; 12) Penyemprotan disinfektan di setiap lantai (setiap hari setelah jam kerja); 13) Pembukaan jendela ruang kerja; 14) Pembagian *Rhea Health Tone* untuk seluruh pegawai dari Eselon III ke bawah; 15) Penyediaan monitor *thermo scan (CCTV Thermal)*; 16) Pembagian Bantuan COVID – 19.



18. Rekening *Virtual* dan *Cash Card*, Kemenko Marves telah melaksanakan PMK 183/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran K/L; Rekening virtual; dan Penarikan dengan *Cash Card* Marves. Kemenko Marves telah melaksanakan PMK 231 Tahun 2019; NPWP tidak atas nama Bendahara lagi melainkan atas nama Instansi.



19. Seleksi Terbuka JPT, Apresiasi dari Peserta Seleksi JPT di Kemenko Marves



20. Survei Kepuasan Layanan Biro Hukum, Total Responden 353 Orang dengan rincian: 14% menilai Buruk; 20% menilai Baik dan 66% menilai Sangat Baik, secara umum masih kategori BAIK: Sebesar 86%.



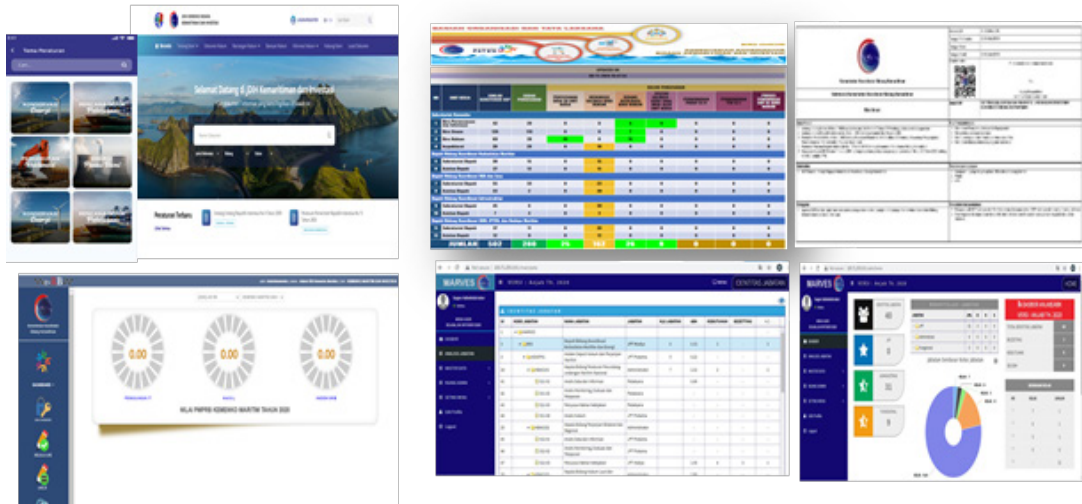
21. Rekomendasi Hasil Evaluasi RB 2019; Road Map RB 2020-2024; Media Komunikasi RB Kemenko Marves (*Website, IG, Youtube, Twitter*). Pemilihan Unit Kerja Pengelolaan RB terbaik (dihadiri oleh Menteri PANRB); Manajemen Pengelolaan Agen Perubahan; Pembangunan ZI, Pelaksanaan SPIP dan Gratifikasi; Penerapan Sistem Merit;



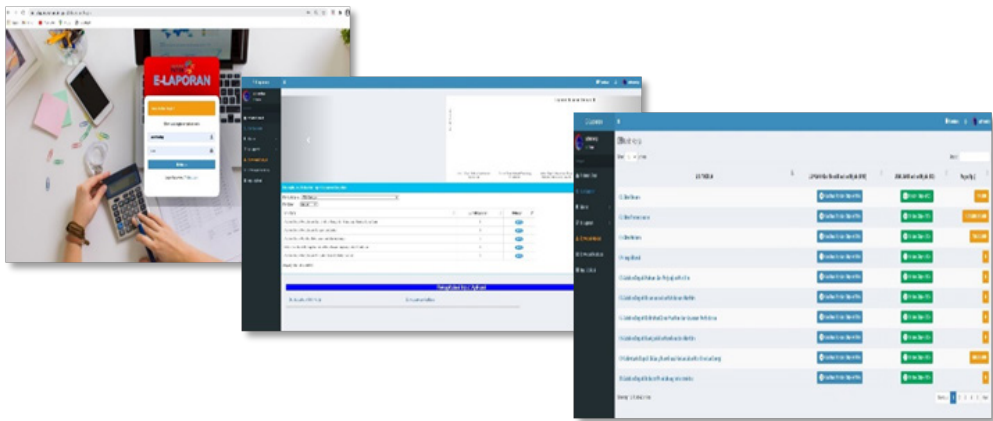
22. Penyetaraan Jabatan (Surat Persetujuan); Permenko Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Marves; Permenko Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Marves pasca Penyederhanaan Birokrasi; Kepmenko tentang Kelas Jabatan 2020; Rancangan Permenko tentang Uraian Tugas JPT pasca Penyederhanaan Birokrasi.



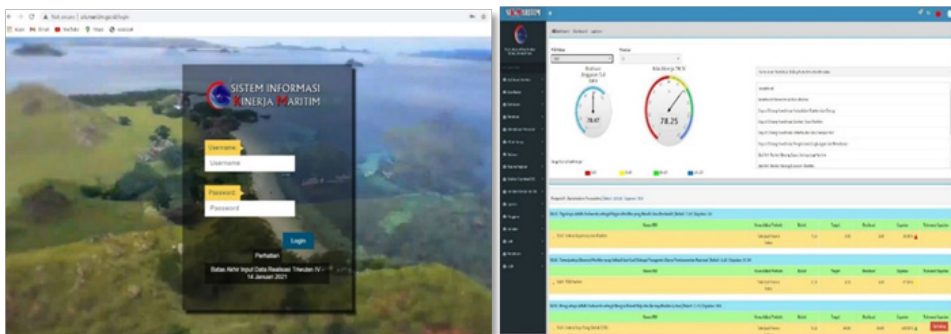
23. Sistem JDih dan *Tracking* PUU (*Web dan Mobile*); Sistem Survei Kepuasan Layanan; Sistem Informasi SOP; E-RB Sistem RB Kemenko Marves; Sistem Orta



24. Pengembangan Aplikasi elaporan dengan penyesuaian Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSP) (<http://elaporan.maritim.go.id/>)



25. Aplikasi SIK-M (Sistem Informasi Kinerja Marves) untuk mengukur capaian kinerja Kemenko Marves (<http://sik.maritim.go.id>)



26. Penghargaan (*Reward*) bagi Aparatur Berprestasi lingkup Biro Hukum Marves



27. Pemberian penghargaan untuk agen perubahan lingkup Kemenko Marves tahun 2020, sebanyak 14 orang aparatur.



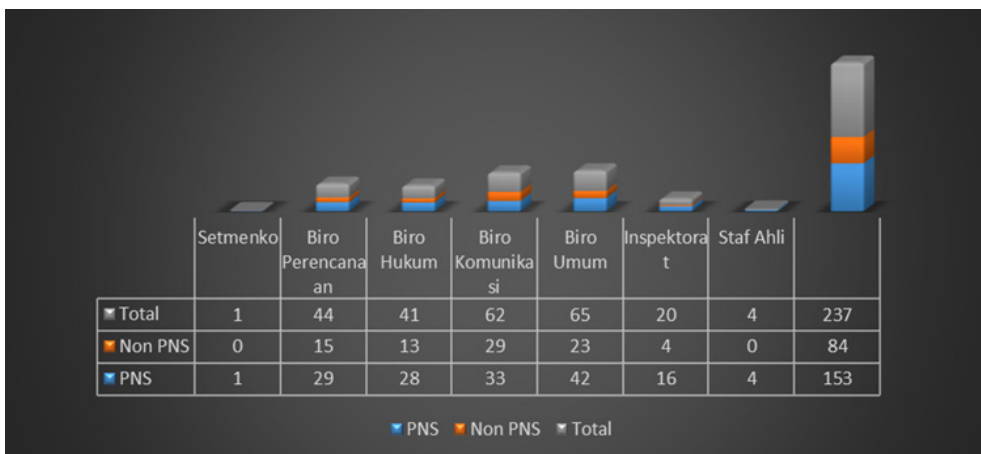
28. Pembuatan videografis/infografis Permenko Marves, sebagai upaya sosialisasi:



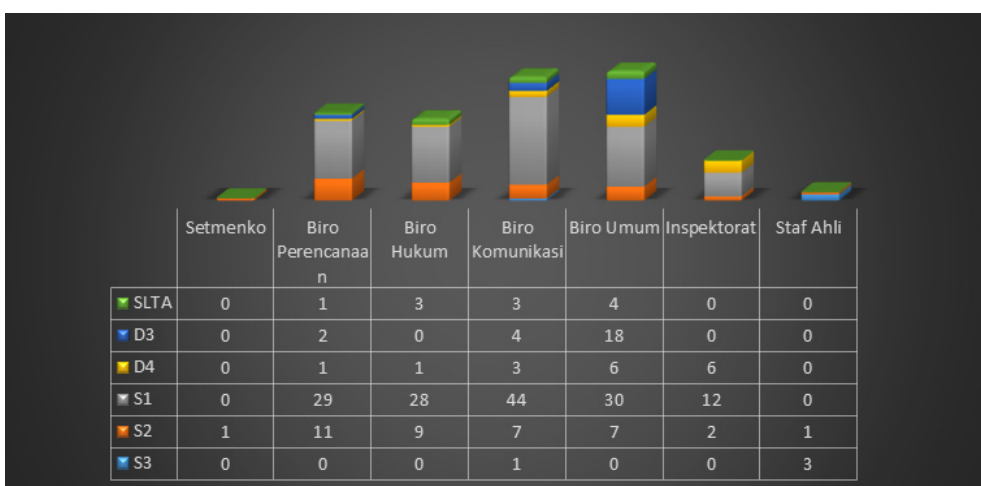
3.4 Analisa Kondisi Sumber Daya

Secara umum, dengan adanya reorganisasi pada tahun 2020 beberapa unit kerja di Kemenko Marves masih kekurangan pegawai, terutama staf bagian teknis yang memahami dasar-dasar keilmuan yang menunjang kegiatan di Deputy. Pada akhir tahun 2020 telah mendapatkan tambahan 53 CPNS, sebagian besar sesuai dengan formasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di Deputy maupun Setmenko Marves, juga terdapat sebagian pegawai tersebut masih dipekerjakan untuk menunjang kegiatan keadministrasian, baik di Asisten Deputy maupun Sekretaris Deputy.

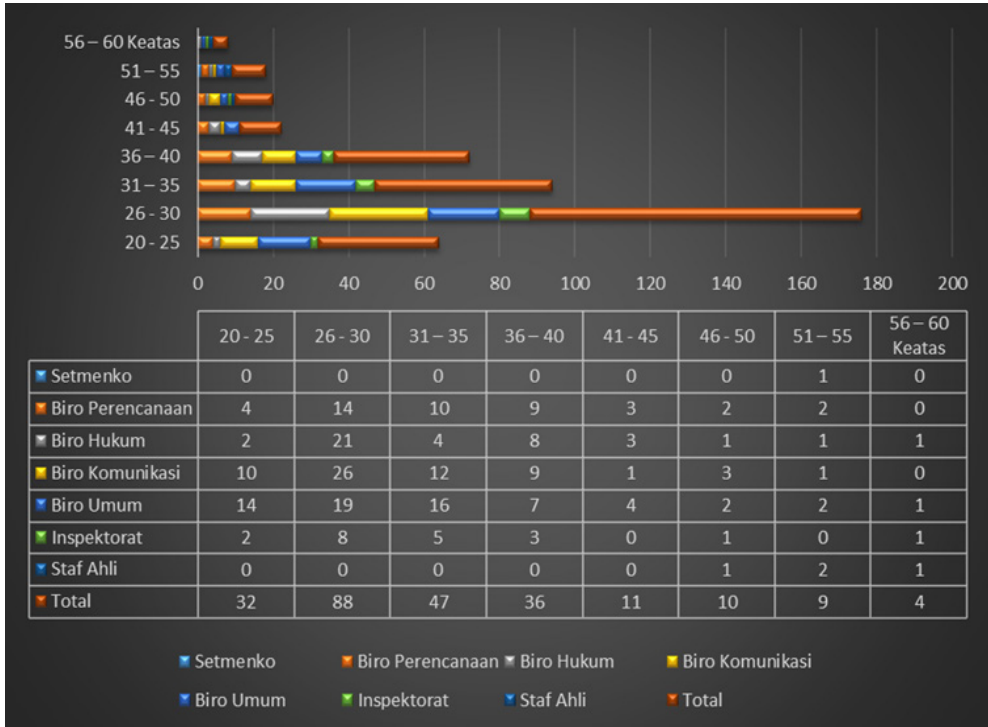
Komposisi jumlah sumberdaya manusia pada Setmenko Marves sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah seluruh pegawai berjumlah 237 orang yang terdiri dari unsur pegawai PNS (termasuk TNI/Polri) 153 orang, serta pegawai non-PNS 84 orang, Komposisi pegawai PNS dan Non PNS seperti terlihat pada gambar berikut ini:



Grafik 7. Jumlah Pegawai Lingkup Setmenko Tahun 2020



Grafik 8. Pegawai Lingkup Setmenko Berdasarkan Jenjang Pendidikan

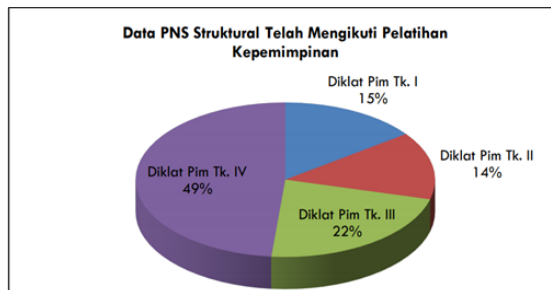


Grafik 9. Pegawai Lingkup Setmenko Berdasarkan Usia

Dari beberapa grafik diatas, dapat diketahui bahwa pegawai PNS di lingkup Setmenko Marves memiliki jumlah yang lebih banyak (64,5%) dibandingkan pegawai non PNS (35,5%). Unit kerja Eselon II dengan jumlah pegawai terbanyak yaitu Biro Umum sebesar 27,42%. Sedangkan unit kerja Eselon II dengan jumlah pegawai terendah yaitu Inspektorat sebesar 8,43%.

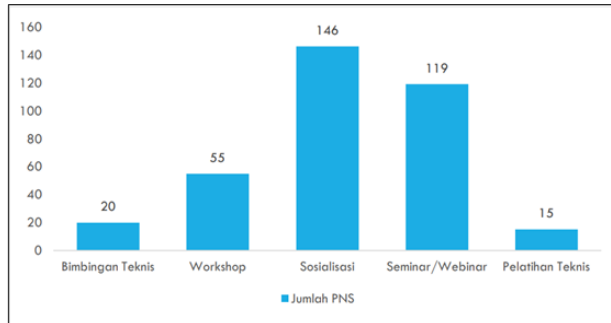
Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai lingkup Setmenko Marves didominasi oleh lulusan S1 dengan jumlah 60,33% dari total seluruh pegawai. Sedangkan jenjang pendidikan dengan jumlah terendah yakni lulusan S3 sebesar 1,68%. Jumlah pegawai dengan rentang usia 26-30 tahun memiliki jumlah tertinggi yaitu sebesar 37,13%. Sedangkan rentang usia dengan jumlah terendah yaitu 56-60 tahun keatas sebesar 1,68%.

Pada tahun 2020, Setmenko Marves telah melaksanakan diklat maupun bimtek bagi pegawai di lingkungan Kemenko Marves. Adapun dari total 7 Pejabat Tinggi Madya, 1 pejabat struktural telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat I. Dari keseluruhan 38 Pejabat Tinggi Pratama, sejumlah 7 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat II. Dari total 97 pejabat administrator, sejumlah 29 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat III, serta dari total 57 pejabat pengawas, sejumlah 37 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat IV.



Grafik 10. Data Pegawai Kemenko Marves Mengikuti Diklat

Jumlah pegawai yang sudah mengikuti diklat fungsional masih sangat rendah yakni sebanyak 10 orang dan belum ada pegawai yang mengikuti diklat teknis. Namun demikian, jumlah pegawai yang telah mengikuti workshop dan seminar tercatat sebanyak 355 orang dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 11. Data Pegawai Kemenko Marves Mengikuti Diklat

Masih rendahnya capaian ini dikarenakan keterbatasan anggaran pelaksanaan diklat di lingkungan Kemenko Marves, dimana beberapa tahun terakhir anggaran Kemenko Marves masih difokuskan kepada penerimaan pegawai baru baik melalui seleksi CPNS maupun pelaksanaan biding pejabat tinggi pratama maupun pejabat tinggi madya.







BAB IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

- Tahun 2020 adalah tahun pertama dari pelaksanaan 5 tahun perencanaan strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kemenko Marves 2020-2024, dimana tahun 2020 menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan atas target yang telah dituangkan dalam dokumen tersebut.
- Secara umum, angka capaian kinerja Setmenko Marves tercapai sebagaimana yang diperjanjikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dimana capaian kinerja Setmenko Marves sebesar 102,68%, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 93,31%.
- Nilai PATEN telah diimplementasikan dalam pemberian layanan dan kinerja yang baik telah berhasil didorong melalui sinergi yang kuat, hal ini ditunjukkan dengan diraihnya berbagai penghargaan dalam hal layanan.
- Seluruh unit kerja Setmenko Marves telah berkomitmen kuat dalam perbaikan perjanjian kinerja dengan terus melakukan perbaikan setiap tahun dan menyusun indikator yang menantang serta tidak langsung puas terhadap kinerja yang telah dicapai.
- Tingginya dinamika yang dialami pada tahun 2020, tidak menjadi kendala dalam meningkatkan layanan yang diberikan. Hal ini dikarenakan koordinasi yang terus dapat dilakukan secara daring antar unit kerja dan dengan stakeholders terkait.
- Adapun beberapa capaian kinerja yang belum dapat diketahui realisasinya seperti nilai RB dan SAKIP tahun 2020 karena KemenPAN & RB baru akan merilis hasil penilaian pelaksanaan RB dan SAKIP pada bulan Maret tahun 2021, sehingga capaian masih menggunakan data tahun 2019. Nilai Indeks SPBE tahun 2020 sampai dengan akhir 2020 KemenPAN & RB belum mengeluarkan hasil dari penilaian. Sehingga untuk menjawab atau mengetahui hasil nilai Indeks SPBE, digunakan penilaian mandiri dikarenakan pada tahun 2020 KemenPAN & RB tidak melaksanakan penilaian ke K/L karena suasana pandemi Covid-19.



4.2 Langkah Perbaikan

Untuk perbaikan dimasa mendatang, maka beberapa langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

- Terus melakukan peningkatan kapasitas pelaporan terutama dalam menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Setmenko Marves yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja yang telah disepakati.
- Terus mengupayakan perbaikan dan peningkatan pencapaian Nilai SAKIP Setmenko Marves melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja dengan selalu berkoordinasi dengan unit kerja di lingkup Kemenko Marves.
- Melakukan peningkatan pemutakhiran perencanaan dengan teknologi informasi, pengumpulan data yang lebih andal, pengukuran yang berjenjang dan sistematika analisis yang lebih komprehensif.
- Terus melakukan peningkatan kapasitas SDM SAKIP melalui pelaksanaan pelatihan (diklat, bimtek, workshop) untuk peningkatan keahlian dan kompetensi pegawai dalam upaya menciptakan efisiensi dan

efektifitas.

- e. Menerapkan kebijakan pemerintah terbaru terkait dengan SAKIP seperti Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan mulai menyiapkan penerapan reward dan punishment.

Adapun tahun 2020 bukanlah tahun tanpa cela - sempurna, tanpa perbaikan, proses revidi atas pelaksanaan kinerja, perbaikan kontrak kinerja, penyusunan Perencanaan Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong proses bisnis dan layanan Sekretariat Kemenko Marves yang lebih baik.

Harapannya, laporan ini dapat menjadi umpan balik dalam proses penyusunan perencanaan kegiatan dan kinerja, sehingga SAKIP di lingkup Setmenko Marves dapat berjalan dengan baik. Melalui pelaksanaan SAKIP yang baik diharapkan unit kerja Setmenko Marves dapat merealisasikan sasaran dan target kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Tujuan akhirnya adalah masyarakat dapat merasakan manfaat yang baik dan signifikan akan keberadaan Kemenko Marves. Semoga.



Lampiran



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Agung Kuswandono
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Luhut B. Pandjaitan
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

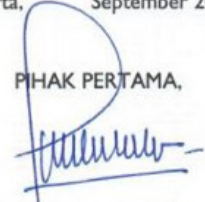
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2020

PIHAK KEDUA,

Luhut B. Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,

Agung Kuswandono

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

TARGET KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
Stakeholders Perspective				
SS.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	75
Customer Perspective				
SS.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2	Nilai SAKIP Kemenko Marves	70
SS.3	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis	3	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang - Undangan	3.5
SS.4	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Eelektronik	4	Indeks SPBE	3
SS.5	Tersedianya SDM Aparatur Yang Profesional dan Kompeten	5	Indeks Profesionalitas ASN	71
SS.6	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	6	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
Internal Business Process Perspective				
SS.7	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Program & Anggaran serta Peraturan Perundang - Undangan yang Efektif	7	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai dengan Ketentuan	100
		8	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan	100
SS.8	Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan yang Prima	9	Persentase Sistem Layanan Kepegawaian yang Baik	80
		10	Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu	95
		11	Persentase Opini Publik yang Positif	70
		12	Persentase Pengadaan Barang & Jasa yang Tepat Waktu	100

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
SS.9	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik	13	Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan	>=5
SS.10	Terselenggaranya Pengelolaan BMN dan Layanan Sistem Informasi yang Baik	14	Persentase Tingkat Kecepatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara	100
		15	Pemenuhan Kebutuhan Minimal Aplikasi Umum yang Terintegrasi Lingkup Kemenko Marves	4
Learning & Growth Perspective				
SS.11	Tersedianya SDM yang Kompeten di Setmenko Marves	16	Persentase SDM yang Kompeten	75
SS.12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Setmenko Marves	17	Nilai PMPRB Setmenko	70
		18	Nilai SAKIP Setmenko	75
SS.13	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Setmenko Marves	19	Nilai IKPA Setmenko	95

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Layanan Persidangan dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 22.785.367.000,00
2	Pengelolaan Layanan Hukum, Advokasi, Kerja Sama dan Organisasi	Rp. 6.830.796.000,00
3	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 137.792.027.000,00
4	Penyelenggaraan Layanan Komunikasi	Rp. 24.134.397.000,00
5	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman & Investasi	Rp. 3.690.000.000,00
6	Penguatan dan Penataan Regulasi & Kelembagaan Kemaritiman Nasional	Rp. 1.243.454.000,00
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 140.782.711.151.000,00

Jakarta, September 2020

Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi RI.



Luhut B. Pandjaitan

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi.



Agung Kuswandono

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
8	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan	8. Persentase jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang berhasil diharmonisasi berbanding dengan jumlah seluruh peraturan perundang - undangan yang sedang disusun sebagaimana Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator (P3MK)				✓
9	Persentase Sistem Layanan Kepegawaian yang Baik	9. Persentase layanan kebutuhan administrasi pegawai yang diberikan dengan baik tepat waktu dan sesuai kaidah yang berlaku berbanding dengan seluruh layanan yang diberikan				✓
10	Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu	10. Persentase penyelesaian tagihan atas beban negara yang tepat waktu berbanding total tagihan beban negara				✓
11	Persentase Opini Publik yang Positif	11. Persentase jumlah opini publik/berita yang menggunakan diksi dan pemilihan bahasa yang mengunggulkan dan atau meninggikan pernyataan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi berbanding dengan seluruh opini yang ada				✓
12	Persentase Pengadaan Barang & Jasa yang Tepat Waktu	12. Persentase jumlah pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu sesuai rencana umum pengadaan berbanding dengan total seluruh pengadaan barang dan jasa				✓
13	Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan	13. Jumlah Pedum Manajerial yang ditetapkan yang terdiri 2 pedum di Biro Perencanaan, 2 Pedum di Bagian Kepegawaian, dan 2 Pedum di Biro Hukum				✓
14	Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara	14. Persentase Laporan BMN di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi yang akuntabel dan tepat waktu				✓
15	Pemenuhan Kebutuhan Minimal Aplikasi Umum yang Terintegrasi Lingkup Kemenko Marves	15. Jumlah aplikasi umum yang diintegrasikan antara lain meliputi: persuratan, kepegawaian, keuangan dan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rapat koordinasi, dengan tingkat integrasi layer pertama (yaitu data dan informasi) berupa Single Sign On.				✓
16	Persentase SDM yang Kompeten	16. Persentase dari Jumlah pejabat Setmenko yang sesuai Kompetensi berbanding total jumlah pejabat Setmenko dikali seratus				✓

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
17	Nilai PMRB Setmenko	17. Hasil penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assesment) oleh Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman & Investasi				✓
18	Nilai SAKIP Setmenko	18. Nilai hasil evaluasi internal AIPF terhadap pelaksanaan SAKIP di lingkup Setmenko				✓
19	Nilai IKPA Setmenko	19. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2020				✓

Jakarta, September 2020

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi,


Agung Kuswandono

PENASEHAT

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Pandjaitan

PENGARAH

Sekretaris Kementerian Koordinator
Agung Kuswandono

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Perencanaan
Arif Rahman

PENYUSUN

Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja
Yetri Fermila
Kepala Bagian Program Dan Anggaran
Achmad Murman
Kepala Bagian Persidangan
Laode Aulia Rahman Hakim
Kepala Bagian Kebijakan Strategis
Muhammad Ghazali Unus
Kepala Subbagian Pengelolaan Dan Pengukuran Kinerja
Nuzulia Yuaniva
Kepala Subbagian Dukungan Akuntabilitas Kinerja
Happy Budi Baswara
Kepala Subbagian Pelaporan Kinerja
Indra Nugraha
Kepala Subbagian Penyusunan Program
Semuel Rahallus
Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran
Teno Sulistyanto
Pelaksana Bagian Akuntabilitas Kinerja
Sari Dewi Maharani
Andi Juhandi
Sigit Nugroho
Deby Purnama

EDITOR

Kasubbag Pelaporan Kinerja
Indra Nugraha
Pelaksana Subbagian Pelaporan Kinerja
Andini Mey Larasati
Anisa Nurhadaya Pramitha

KONTRIBUTOR:

Inspektur
Kepala Biro Hukum
Kepala Biro Komunikasi
Kepala Biro Umum
Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan
Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum
Kepala Bagian Kerja Sama
Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Kepala Bagian Data dan Sistem Informasi
Kepala Bagian Kepegawaian
Kepala Bagian Keuangan
Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
Kepala Bagian Administrasi Umum
Foto Dokumentasi
Tim Humas Biro Komunikasi
Produksi
Biro Perencanaan, Gd. Kemenko Marves Lt.5
Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340